

**PENYUSUNAN EVALUASI KINERJA PEREKONOMIAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2021**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Surakarta
Tahun 2022**

PRAKATA

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan kekuatanNya. Atas perkenannya laporan Evaluasi Kinerja Perekonomian Kota Surakarta Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Evaluasi Kinerja Perekonomian Kota Surakarta Tahun 2021 merupakan produk tahunan yang disusun oleh Bidang PSDA Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran perekonomian Kota Surakarta dalam jangka waktu satu tahun. Aspek-aspek yang dikaji dalam laporan ini adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketimpangan, pengangguran, APBD, dan juga analisis perbandingan dengan daerah lain.

Bidang PSDA Bappeda dan Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terutama segenap pimpinan dan pegawai di Bappeda Kota Surakarta yang telah membantu mengalokasikan anggaran, support data, dan memberikan berbagai masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam menyelesaikan dan menyempurnakan kajian ini.

Semoga kajian dapat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan di Kota Surakarta.

Surakarta, 2022

Bidang Ekonomi Bappeda Surakarta

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Kegiatan	2
1.3. Manfaat Kegiatan	2
1.4. Lingkup Kegiatan	2
1.5. Metodologi	3
1.6. Sistematika Laporan	4
BAB II GAMBARAN UMUM KINERJA PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA	5
2.1. Visi Dan Misi Kota Surakarta	5
2.2. Tema Pembangunan Kota Surakarta	6
2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi	7
2.4. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	11
2.5. Kesejahteraan	13
2.6. Kemiskinan	17
2.7. Pendidikan	17
BAB III KONSEP DAN METODE KAJIAN	20
3.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi	20
3.2. Demografi dan Ketenagakerjaan	21
3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	22
3.4. Keuangan Daerah	23
3.4.1. Analisis Pendapatan Daerah	23
3.4.2. Analisis Belanja	27
3.4.3. Analisis Pembiayaan	29
3.5. Kemiskinan	31
3.6. Ketimpangan Distribusi Pendapatan	31
3.7. Sumber Data	33
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Analisis Kinerja Makroekonomi Kota Surakarta	34
4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto Dan Pertumbuhan Ekonomi	34
4.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	36
4.1.3. Inflasi	38
4.1.4. Kemiskinan dan Ketimpangan	39
4.1.5. Ketenagakerjaan	43
4.1.6. ICOR dan PDRB	47
4.1.7. LQ dan Shift-Share	49
4.1.8. Analisis Rasio PDRB	53
4.1.9. Analisis Makro Keuangan Daerah	57
4.2. Analisis Perbandingan Antar Wilayah di Jawa Tengah	64
4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi	64
4.2.2. Kemiskinan	66

	4.2.3. Tingkat Pengangguran	67
	4.2.4. Indikator Sosial Dan Kesejahteraan	68
	4.3. Rangkuman Indikator Utama Makroekonomi Kota Surakarta	81
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	72
	5.1. Kesimpulan	72
	5.2. Rekomendasi	73
	5.2.1. Jangka Pendek/ Menengah	73
	5.2.2. Jangka Menengah/ Panjang	73
	DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Indikator Makroekonomi RPJMD Kota Surakarta	6
Tabel 2.2	Struktur PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2020	9
Tabel 2.3	PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2020 Berdasarkan Jenis Pengeluaran	10
Tabel 2.4	Perbandingan Jumlah dan Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2020	10
Tabel 2.5	Sebaran Penduduk Kota Surakarta Tahun 2019	12
Tabel 2.6	Sebaran Penduduk Kota Surakarta Tahun 2019	12
Tabel 2.7	Indikator Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2010-2020	18
Tabel 2.8	Indikator Kemiskinan Kota Surakarta Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010-2020	18
Tabel 3.1	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Metode Baru	22
Tabel 4.1	Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2020	35
Tabel 4.2	PDRB Perkapita Kota Surakarta Tahun 2010-2020	37
Tabel 4.3	Inflasi Tahun 2021	38
Tabel 4.5	Indeks Gini Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional	39
Tabel 4.6	Indikator Ketenagakerjaan Kota Surakarta Tahun 2010-2020 ..	43
Tabel 4.7	Pengangguran Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2020	45
Tabel 4.8	PDRB dan Serapan Tenaga Kerja	46
Tabel 4.9	ICOR Kota Surakarta Tahun 2011-2019.	48
Tabel 4.10	Nilai LQ dan Dynamic LQ Kota Surakarta 2019-2020	51
Tabel 4.11	Overlay LQ dan DLQ Sektor Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2020	51
Tabel 4.12	Nilai Regional/National Share Kota Surakarta Tahun 2019- 2020	52
Tabel 4.13	Perbandingan Rasio Ekspor Terhadap PDRB Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional	54
Tabel 4.14	Perbandingan Rasio Ekspor Terhadap PMTB Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional	54
Tabel 4.15	Perkembangan Realisasi APBD Kota Surakarta Tahun 2015- 2020	58
Tabel 4.16	Rasio APBD Kota Surakarta Tahun 2015-2020	60
Tabel 4.17	Perbandingan Rasio APBD Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2019	60
Tabel 4.18	Alokasi Kredit Perbankan Pada Sektor Ekonomi Tahun 2018- 2020	61
Tabel 4.19	Proporsi Non Performing Loan (NPL) Tahun 2020	61
Tabel 4.20	Rasio Kredit terhadap PDRB dan Elastisitas	63
Tabel 4.21	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2019-2020	65
Tabel 4.22	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Surakarta vs Provinsi vs	67

	Nasional Tahun 2019-2020.....	
Tabel 4.23	Perbandingan Tingkat Pengangguran Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2019-2020.....	69
Tabel 4.24	Komponen IPM Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2019-2020.....	70
Tabel 4.25	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.....	71
Tabel 4.26	Ringkasan Indikator Utama Makroekonomi Kota Surakarta 2019-2020.....	71
Tabel 4.27	Peringkat Indikator Makroekonomi Kota Surakarta di Jawa Tengah Tahun 2019-2020.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2010-2021...	8
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kab Jawa Tengah Tahun 2010-2021	8
Gambar 2.3	Tingkat Pengangguran Tahun 2010-2020	13
Gambar 2.4	Pendapatan Perkapita ADHB Tahun 2010-2020	14
Gambar 2.5	Pertumbuhan Pendapatan Perkapita 2011-2020	15
Gambar 2.6	Perkembangan IPM Kota Surakarta 2010-2020	16
Gambar 3.1	Kurva Kuznets.....	32
Gambar 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2010-2020 ...	36
Gambar 4.2	Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Tahun 2010-2020	3
Gambar 4.3	Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2010-2020	41
Gambar 4.4	Indes Gini Kota Surakarta Tahun 2000-2015	42
Gambar 4.5	Usia Pengangguran Kota Surakarta Tahun 2018	44
Gambar 4.6	Pendidikan Tertinggi Pengangguran Kota Surakarta Tahun 2018.....	45
Gambar 4.7	Perbandingan Rasio Ekspor Terhadap PMTB Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional	55
Gambar 4.9	Tax Rasio Kota Surakarta Tahun 2010-2020	56
Gambar 4.11	Rasio PAD terhadap PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2020.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Evaluasi merupakan kegiatan yang mutlak diperlukan dalam pembangunan daerah. Berbagai peraturan perundangan menyatakan bahwa kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap daerah, misalnya evaluasi pelaksanaan RKPD atau RPJMD. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tujuan tertentu.

Menurut *Local Economic and Employment Development* atau LEED (2009) evaluasi dalam terminologi ekonomi adalah penentuan perkembangan kemajuan dari kebijakan, program, atau proyek yang menyebabkan perubahan. Evaluasi merupakan hal yang sangat penting kaitannya dengan pembuatan kebijakan dan perencanaan. Evaluasi memungkinkan desain dan modifikasi kebijakan dan program yang dibuat dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengertian lain dari evaluasi diungkapkan oleh Chelimsky (1989) yaitu suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektivitas suatu program. Wirawan (2006) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek yang dievaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi. Dari beberapa pengertian yang ada memberikan pengertian yang secara substantif sama, bahwa evaluasi merupakan cara yang dipergunakan untuk melihat bagaimana implementasi dari program atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya, melalui suatu metode tertentu.

Menurut LEED (2009) evaluasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif (*summative evaluation*). Evaluasi formatif merupakan evaluasi terhadap suatu proses sedangkan evaluasi sumatif merupakan evaluasi terhadap dampak atau *outcome*. Evaluasi formatif berfokus pada bagaimana program dijalankan sedangkan evaluasi sumatif berfokus pada bagaimana hasil dari program tersebut.

Menurut LEED (2009) pengertian evaluasi berbeda dengan pengertian monitoring. Monitoring berkaitan dengan apa yang terjadi berdasarkan informasi yang dikumpulkan sementara evaluasi memberikan dasar dalam justifikasi dan keputusan antara “ya” dan “tidak”, misalnya hasil evaluasi menyimpulkan suatu program “tercapai” dan “tidak tercapai” atau “sesuai” dan “tidak sesuai”, dan sebagainya. Untuk itu dalam evaluasi dibutuhkan data yang *reliable*, akurat, dan mutakhir (LEED, 2009:11). Solihin (2012) membedakan

monitoring dan evaluasi dari aspek: tujuan, fokus, cakupan, serta waktu pelaksanaan. Dalam hal tujuan misalnya, monitoring menilai kemajuan dalam pelaksanaan program sementara evaluasi memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program. Dalam hal waktu, monitoring dilakukan secara terus menerus atau berkala selama pelaksanaan program sedangkan evaluasi dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program.

Evaluasi kinerja makroekonomi Kota Surakarta merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat dan mengamati sejauh mana pembangunan daerah khususnya bidang makroekonomi telah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini perlu dilakukan agar kebijakan dan strategi yang telah disusun dapat berjalan efektif. Dengan kegiatan evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi kinerja makroekonomi Kota Surakarta, serta posisi Kota Surakarta diantara daerah lain sehingga kebijakan dan strategi yang disusun untuk periode ke depan dapat disusun secara lebih efektif berdasarkan situasi dan kondisi yang telah berjalan.

1.2. TUJUAN KEGIATAN

1. Mengidentifikasi capaian kinerja makroekonomi Kota Surakarta dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program di periode mendatang.
2. Mengidentifikasi permasalahan makroekonomi Kota Surakarta yang muncul
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan makroekonomi Kota Surakarta di periode pembangunan berikutnya.

1.3. MANFAAT KEGIATAN

1. Teridentifikasinya capaian kinerja makroekonomi Kota Surakarta sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan makroekonomi.
2. Dapat diketahuinya pokok-pokok permasalahan makroekonomi Kota Surakarta sehingga dapat disusun prioritas kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi pokok permasalahan tersebut
3. Tersusunnya alternatif rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan pokok permasalahan dalam makroekonomi Kota Surakarta.

1.4. LINGKUP KEGIATAN

1. Analisis capaian kinerja pembangunan ekonomi Kota Surakarta yang meliputi:
 - a) Analisis PDRB (PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, sektoral PDRB)
 - b) Analisis ketenagakerjaan (angkatan kerja, pengangguran)

- c) Analisis kemiskinan dan ketimpangan (tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan)
 - d) Analisis inflasi (inflasi umum, inflasi sektoral)
 - e) Analisis kesejahteraan masyarakat (angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil masyarakat, IPM, IPG)
2. Analisis perbandingan capaian kinerja makroekonomi Kota Surakarta dengan daerah lain (antar kota atau rata-rata daerah Jawa Tengah).

1.5. METODOLOGI

A. Tahapan Analisis

1. Studi literature tentang evaluasi kinerja makroekonomi Kota Surakarta.
2. Identifikasi dan pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan tujuan dan lingkup studi.
3. Pengolahan dan analisis data sekunder tahap 1 dengan alat analisis yang disesuaikan.
4. Pengolahan dan analisis data tahap 2.
5. Penyajian hasil analisis dalam forum FGD (kinerja capaian indikator serta relevansinya dengan dokumen perencanaan daerah).
6. Penyempurnaan hasil analisis dan penyajian laporan akhir.

B. Alat Analisis

B.1. Analisis Capaian Kinerja Makroekonomi

Analisis PDRB

Alat analisis PDRB yang akan dipergunakan terdiri dari: analisis pertumbuhan ekonomi, analisis kontribusi sektoral, analisis rata-rata pertumbuhan ekonomi, analisis PDRB perkapita, analisis shift-share, dan analisis LQ.

Analisis Ketenagakerjaan

Dalam hal ketenagakerjaan, akan dipergunakan alat analisis berupa: analisis statistik (pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan, dan koefisien variasi) profil pengangguran berdasarkan sektor ekonomi dan jenis kelamin, analisis tingkat pengangguran, analisis pertumbuhan pengangguran.

Analisis Kemiskinan

Alat analisis yang akan dipergunakan meliputi: analisis statistik profil kemiskinan, analisis tingkat kemiskinan, analisis kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Analisis Inflasi

Inflasi akan dianalisis dengan alat berupa metode statistic (pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan, dan koefisien variasi) untuk melihat: profil inflasi secara umum serta inflasi sektoral.

Analisis Kesejahteraan Masyarakat

Analisis ini dilakukan dengan metode statistika (pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan, dan koefisien variasi) guna mendapatkan informasi perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan kependidikan.

B.2. Analisis perbandingan capaian kinerja makroekonomi Kota Surakarta dengan daerah lain.

Analisis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode statistic untuk membandingkan secara kuantitatif posisi kinerja makroekonomi Kota Surakarta dengan daerah lain.

SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, proses dan penyusunan Kajian Evaluasi Kinerja Makroekonomi Kota Surakarta.

BAB II : Gambaran Umum Makroekonomi Kota Surakarta

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran secara umum kinerja makroekonomi Kota Surakarta, yang juga dikaitkan relevansinya dengan dokumen RPJMD dan RKPD, sehingga kegiatan analisis dapat lebih fokus.

BAB III : Konsep Evaluasi Pembangunan dan Metoda Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep dasar evaluasi pembangunan daerah khususnya bidang makroekonomi, serta cara pengumpulan dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis ekonomi regional secara utuh mengenai kondisi makroekonomi Kota Surakarta beserta analisis data dengan metode yang sesuai, sehingga dapat diketahui kinerja dan kesesuaian pembangunan ekonomi dengan dokumen visi dan misi.

BAB V : Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis dan pembahasan dalam penyusunan kajian regional Kota Surakarta.

BAB II

GAMBARAN UMUM MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA

2.1. VISI DAN MISI KOTA SURAKARTA

Visi Misi Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah:

Visi :

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh.
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Surakarta perlu melakukan kerjasama dengan daerah sekitar. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh posisi geografis Surakarta yang sangat strategis. Dalam RPJMD, sesuai RTRW Kawasan Kerjasama Regional yang terkait dengan Kota Surakarta adalah Kawasan Subosukawonosraten dan Kawasan Sosebo (Solo, Selo/Boyolali, dan Borobudur) yang memiliki SDA, kesuburan tanah, dan objek wisata. Dalam regional Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta dijadikan kawasan peruntukan industri skala wilayah untuk produk-produk unggulan berbasis industri kerajinan dan kawasan pariwisata.

Tingkat ketercapaian visi-misi dituangkan melalui berbagai indikator. Antara lain indikator makroekonomi daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD. Indikator tersebut

dipergunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja makroekonomi. Target indicator kinerja makroekonomi Kota Surakarta hingga 2020 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Indikator Makroekonomi RPJMD Kota Surakarta

No	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan ekonomi/PDRB	5 + 1	5 + 1	6 + 1	6 + 1	6 + 1
2	Tingkat inflasi	3 + 1	4 + 1	3 + 1	3 + 1	4 + 1
3	Indeks Gini	0.332	0.321	0.320	0,305	0,301
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9.64	8.99	8.34	7,68	7,03
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	77.08	77.11	77.16	77,19	77,23
6	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.44	10.51	10.59	10,67	10,75
7	Harapan lama sekolah (tahun)	14.34	14.53	14.73	14,94	15,15
8	Pengeluaran per kapita (Rupiah)	14,291,000.00	14,806,000.00	15,301,000.00	15.776.000,00	16.242.000,00
9	Pendapatan per kapita (Rupiah)	58,142,285	60,922,566	63,823,146	66.534.166	69.337.235,56
10	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	97.08	97.37	97.67	97,98	98,29
11	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	5.83	5.76	5.68	5,61	5,55

Sumber: RPJMD Kota Surakarta, 2021.

2.2. TEMA PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA

Berdasarkan visi dan misi yang ada, tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2019 adalah **“Pengembangan Daya Saing Kota didukung Kemandirian Masyarakat Berbasis Kearifan Budaya”**, yang merupakan kelanjutan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, dengan menambahkan penekanan pada penguatan daya saing serta kemandirian masyarakat. Tema ini fokus pada program dan kegiatan pembangunan yang berdampak pada partisipasi masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pemasaran keunggulan kota melalui aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya untuk memperluas jangkauan pemasaran produk kota, dan peningkatan jumlah pengunjung luar kota yang beraktivitas di Kota Surakarta. Dampak lain yang diharapkan adalah penambahan jumlah variasi produk, jasa, dan event kota yang melibatkan pelaku dari luar daerah dan kemandirian masyarakat rentan dalam pengembangan usaha untuk menambah pendapatan.

Program dan kegiatan pembangunan juga diprioritaskan pada hal yang berdampak menguatkan kearifan budaya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa merusak

lingkungan, menjaga keadilan antar golongan kelompok masyarakat, dan menguatkan kesiagaan masyarakat untuk antisipasi bencana (baik bencana alam maupun bencana sosial). Program dan kegiatan tersebut disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2019 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Semua hal tersebut diintegrasikan untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Surakarta Tahun 2019.

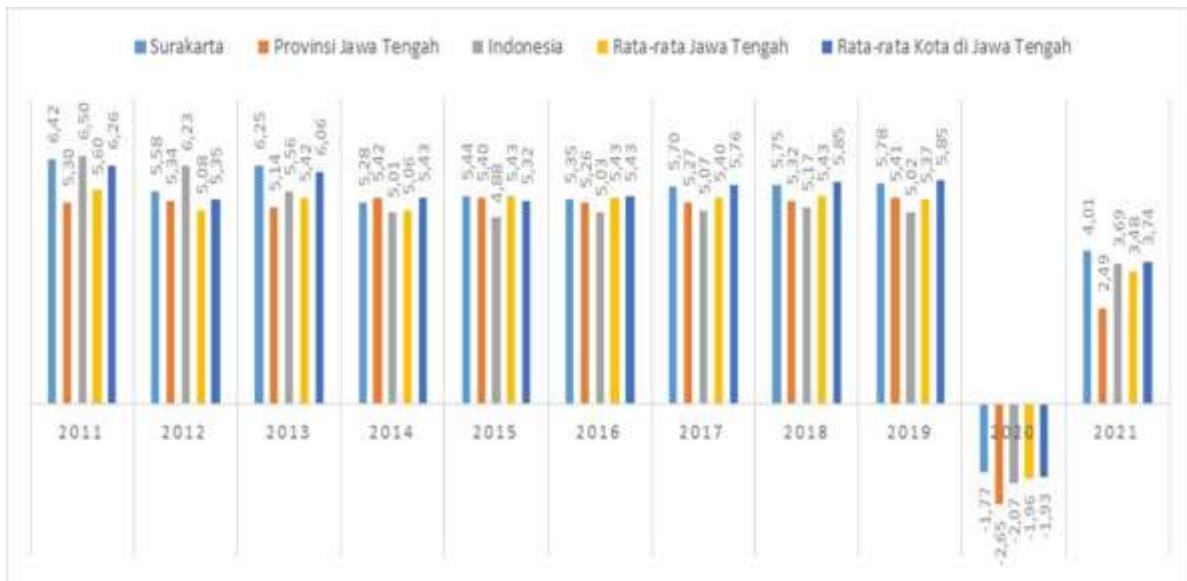
Evaluasi makroekonomi Kota Surakarta secara substantive tidak lepas dari evaluasi pelaksanaan RKPD karena makroekonomi meruakan salah satu aspek dalam dokumen RKPD. Sementara itu, dokumen RKPD idelanya juga berlandaskan pada dokumen RPJMD yang telah disusun. Hal ini mengingat bahwa RKPD pada dasarnya adalah tahapan dalam upaya pencapaian RPJMD.

Dengan demikian, evaluasi aspek makroekonomi bukanlah evaluasi RKPD secara keseluruhan mengingat luasnya cakupan RKPD. Evaluasi makroekonomi lebih difokuskan pada kinerja perekonomian secara makro yang telah dilaksanakan dan berhasil dicapai.

2.3. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRUKTUR EKONOMI

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Surakarta tercatat 5,78%. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya adalah 5,75%. Selama 2017-2019 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta terlihat mengalami penekanan, yang didasarkan pada semakin kecilnya kenaikan pertumbuhan ekonomi selama 2017-2019 tersebut. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta akhirnya mencapai angka -1,77% akibat situasi dan kondisi Pandemi Covid, yang melumpuhkan hamper semua aktivitas perekonomian. Hingga pada tahun 2021, pasca Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta mulai mengalami peningkatan dari -1,77% menjadi 4,01%.

Sepanjang tahun 2011-2019, sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi terendah Surakarta adalah pada tahun 2014 yang mencapai sebesar 5,28% sedangkan yang tertinggi adalah tahun 2011 yang mencapai 6,42%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Surakarta per tahun selama 2011-2020 adalah 4,89%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mencapai -1,74% tersebut menyebabkan adanya tekanan yang sangat berat, mengingat tidak mudah untuk memulihkan perekonomian dalam waktu yang singkat.



Sumber: Data sekunder, diolah

Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi 2011-2021

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat terlihat bahwa pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 4.01%. Angka tersebut juga berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah serta rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten/Kota	2019-2020	2020-2021	Kabupaten/Kota	2019-2020	2020-2021
Kabupaten Cilacap	-12,55	12,43	Kabupaten Kudus	-6,2	1,13
Kabupaten Banyumas	-7,97	5,65	Kabupaten Jepara	-7,94	6,55
Kabupaten Purbalingga	-6,82	4,37	Kabupaten Demak	-5,59	2,85
Kabupaten Banjarnegara	-6,92	4,58	Kabupaten Semarang	-8,06	6,3
Kabupaten Kebumen	-6,97	5,16	Kabupaten Temanggung	-7,18	5,47
Kabupaten Purworejo	-7,05	4,99	Kabupaten Kendal	-7,22	5,4
Kabupaten Wonosobo	-7,21	5,32	Kabupaten Batang	-6,68	6,17
Kabupaten Magelang	-6,97	5,15	Kabupaten Pekalongan	-7,24	5,43
Kabupaten Boyolali	-7,16	5,83	Kabupaten Pemalang	-6,41	4,8
Kabupaten Klaten	-6,65	4,99	Kabupaten Tegal	-7,04	5,2
Kabupaten Sukoharjo	-7,62	5,52	Kabupaten Brebes	-6,23	2,8
Kabupaten Wonogiri	-6,55	4,76	Kota Magelang	-7,86	5,65
Kabupaten Karanganyar	-7,63	5,44	Kota Surakarta	-7,54	5,77
Kabupaten Sragen	-7,71	5,56	Kota Salatiga	-7,58	5,01
Kabupaten Grobogan	-6,94	5,35	Kota Semarang	-8,66	7,01
Kabupaten Blora	-8,61	8,24	Kota Pekalongan	-7,37	5,46
Kabupaten Rembang	-6,69	5,34	Kota Tegal	-8,06	5,41
Kabupaten Pati	-6,97	4,54			

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.2

Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Jawa Tengah 2019-2021

Selama 2019-2020, penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar adalah Kabupaten Cilacap (dari 2,27% menjadi -10,28% atau mengalami penurunan sebesar -12,55%) dan terkecil adalah Kabupaten Demak (-5,59%). Tahun 2020-2021, kenaikan pertumbuhan ekonomi terbesar adalah Kabupaten Cilacap (dari -10,28% menjadi 2,15% atau naik sebesar 12,43%) dan terkecil adalah Kabupaten Kudus (1,13%)

Berdasarkan pendekatan harga berlaku (*current price*), perekonomian Surakarta pada tahun 2021 didominasi oleh 4 sektor utama, yaitu sektor konstruksi (26,65%), sektor perdagangan besar dan eceran (21,96%), sektor informasi dan komunikasi (14,86%), serta sektor industri pengolahan (8,66%). Proporsi sektor tersebut selama 2012-2021 meski berfluktuasi namun cenderung konstan.

Dibandingkan dengan periode awal RPJMD yaitu tahun 2016, kontribusi beberapa sektor yang menunjukkan peningkatan adalah sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa kesehatan dan kesejahteraan sosial. Beberapa sektor utama seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi makan minum terlihat menunjukkan penurunan kontribusi meskipun sangat kecil.

Bila dilihat mulai tahun 2011 sektor industri pengolahan menunjukkan kenaikan kontribusi yang cukup besar dari 8,08% di tahun 2010 menjadi 8,45% di tahun 2020, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (dari 4,98% menjadi 13,98%), sektor informasi dan komunikasi (dari 11,13% menjadi 14,54%), sektor jasa keuangan dan asuransi (3,66% menjadi 3,90%), sektor jasa perusahaan (dari 0,67% menjadi 0,81%), sektor jasa pendidikan (dari 4,42% menjadi 5,64%), serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (dari 0,92% menjadi 1,31%). Di tahun 2020 beberapa sektor menunjukkan penurunan proporsi dibandingkan tahun 2019, seperti sektor industri pengolahan menjadi 8,45%, sektor konstruksi (27,04%), sektor transportasi dan pergudangan (1,03%), sektor perdagangan (21,63%), dan sebagainya.

Dengan demikian selama 2012-2020 terlihat adanya pergeseran perubahan struktur ekonomi Surakarta secara gradual menjadi kota perdagangan, jasa, dan industri yang didukung dengan informasi dan komunikasi. Perubahan struktur ini sangat wajar mengingat perubahan struktur ekonomi yang dinamis umumnya terjadi pada jangka waktu yang sangat lama.

Tabel 2.2
Struktur PDRB Kota Surakarta Tahun 2012-2020

Lapangan Usaha	Proporsi				Pertumbuhan				2019-2020		Tren 2011-2020	
	2011	2016	2019	2020	2011	2016	2019	2020	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,52	0,52	0,49	0,51	15,17	7,25	6,46	4,32	Naik	Turun	Turun	Turun
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,52	1,15	-63,94	-2,59	Turun	Naik	Turun	Turun
C. Industri Pengolahan	8,08	8,62	8,46	8,45	18,11	8,37	8,12	-0,87	Turun	Turun	Naik	Turun
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,20	0,20	0,20	8,81	13,99	5,61	1,08	Naik	Turun	Turun	Turun
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,21	0,15	0,14	0,16	3,98	4,05	6,23	9,27	Naik	Naik	Turun	Naik
F. Konstruksi	27,04	26,98	27,11	27,04	6,66	8,30	7,89	-0,98	Turun	Turun	Naik	Turun
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,42	22,48	22,16	21,63	14,20	7,62	8,08	-3,09	Turun	Turun	Turun	Turun
H. Transportasi dan Pergudangan	2,49	2,63	2,59	1,03	5,21	5,90	9,49	-60,63	Turun	Turun	Turun	Turun
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,98	5,83	5,41	4,58	13,98	9,29	6,49	-16,05	Turun	Turun	Turun	Turun
J. Informasi dan Komunikasi	11,13	10,45	12,01	14,54	9,04	6,19	11,22	20,21	Naik	Naik	Naik	Naik
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,66	3,86	3,76	3,90	11,72	11,21	5,92	2,86	Naik	Turun	Naik	Turun
L. Real Estate	4,17	4,12	3,85	3,97	9,92	8,29	4,85	2,41	Naik	Turun	Turun	Turun
M,N. Jasa Perusahaan	0,67	0,82	0,86	0,81	17,76	12,82	11,23	-6,36	Turun	Turun	Naik	Turun
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,08	5,96	5,40	5,39	4,84	7,89	5,47	-1,04	Turun	Turun	Turun	Turun
P. Jasa Pendidikan	4,42	5,34	5,51	5,64	34,37	7,45	8,98	1,69	Naik	Turun	Naik	Turun
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,92	1,10	1,12	1,31	20,06	7,96	7,27	16,32	Naik	Naik	Naik	Turun
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,99	0,95	0,95	0,84	6,62	10,45	8,15	-11,87	Turun	Turun	Turun	Turun
PDRB	100	100	100	100	11,36	8,01	8,04	-0,75				

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

PDRB Kota Surakarta dari pendekatan pengeluaran menunjukkan bahwa proporsi konsumsi rumah tangga selama 2010-2019 relatif stabil, sementara pengeluaran LNPRT menunjukkan tren proporsi yang meningkat. Pengeluaran pemerintah sepanjang 2010-2019 meski sedikit mengalami fluktuasi namun proporsinya cenderung turun sedangkan pembentukan modal tetap bruto terlihat menunjukkan proporsi yang meningkat. Hal ini merupakan indikasi bahwa komponen investasi dalam pembentukan PDRB di Kota Surakarta memiliki peran yang sangat penting dan strategis, serta menunjukkan tren peningkatan. Untuk proporsi ekspor bersih, terlihat selama 2010-2019 menunjukkan deficit yang cukup

besar, yang berarti masih tingginya impor barang dan jasa yang masuk ke Kota Surakarta dibandingkan ekspor barang dan jasa dari Kota Surakarta.

Tabel 2.3

PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2029 Berdasarkan Jenis Pengeluaran

JENIS PENGELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,66	50,77	50,89	51,79	51,99	51,93	50,83	50,75	50,84	50,44
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,56	0,55	0,56	0,59	0,62	0,60	0,61	0,61	0,63	0,65
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,56	11,70	11,85	12,15	12,13	12,51	11,61	11,46	10,97	10,61
Pembentukan Modal Tetap Bruto	67,36	66,46	66,40	66,38	67,55	66,90	67,64	67,73	70,15	70,56
Perubahan Inventori	0,06	4,06	6,78	4,21	2,54	0,63	0,23	0,35	0,71	0,61
Net Ekspor Barang dan Jasa	-30,20	-33,54	-36,48	-35,14	-34,83	-32,58	-30,93	-30,89	-33,29	-32,86
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

2.4. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Jumlah penduduk Surakarta tahun 2019 berdasarkan data Disdukcapil Kota Surakarta adalah 575.230 jiwa sedangkan berdasarkan data BPS 519.587. Tahun 2020, berdasarkan data sensus penduduk yang diselenggarakan oleh BPS, jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 522.364. Sepanjang 2013-2020 rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Surakarta adalah sebesar 0,40% (berdasarkan data BPS) atau 0,34% (berdasarkan data Disdukcapil 2013-2019). Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, rata-rata pertumbuhan penduduk Surakarta lebih rendah sepanjang 2013-2020.

Tabel 2.4

Perbandingan Jumlah dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2020

No	Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta (BPS)	507.798	510.105	512.226	514.171	516.102	517.887	519.587	522.364*	0,40
	Surakarta (Disdukcapil)	563.659	552.650	557.606	570.876	562.801	569.711	575.230	n.a.	0,34
2	Provinsi Jawa Tengah	33.264.339	33.522.663	33.774.141	34.019.095	34.257.865	34.490.835	34.720.000	36.516.035	1,34
3	Indonesia	248.818.100	252.164.800	255.461.700	258.705.000	261.890.900	265.015.300	266.910.000	270.200.000*	1,18

**hasil Sensus Penduduk 2020*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Dilihat dari sebarannya, berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Surakarta, tahun 2019 sebagian besar penduduk bermukim di Kecamatan Banjarsari (31,89%) dan yang terkecil adalah jumlah penduduk di Kecamatan Serengan (9,50%). Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pasar Kliwon yaitu 18.026,97/km². Dari sisi kelompok umurnya, piramida penduduk Surakarta cenderung datar karena proporsi penduduk antar kelompok umur tidak berbeda jauh mulai kelompok umur 0-4 tahun hingga 55-59 tahun sedangkan mulai kelompok umur 60 ke atas memiliki proporsi semakin kecil. Kondisi ini merupakan salah satu indikasi cukup tingginya penduduk usia produktif. Untuk rasio jenis kelamin, pada tahun 2019 secara umum antar kecamatan hampir sama, yaitu berkisar antara 95-98. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 95-98 penduduk laki-laki.

Sementara berdasarkan data BPS tahun 2020, proporsi penduduk di Kecamatan Serengan adalah 9,15% dan Kecamatan Banjarsari adalah 32,31%. Tingkat kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Serengan yaitu 17.138,24/km². Dengan tingkat kepadatan keseluruhan pada tahun 2020 mencapai 13.061,53 km². Rasio jenis kelamin tahun 2020 untuk semua kecamatan tidak jauh berbeda yaitu berkisar 95-98. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan di masing-masing kecamatan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 2.5

Sebaran Penduduk Kota Surakarta Tahun 2019

Kecamatan	Penduduk	Pertumbuhan 2018-2019	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²	Rasio Jenis Kelamin
Laweyan	102 524	0,64	17,82	11866,20	95,83
Serengan	54 671	0,64	9,50	17138,24	96,08
Pasar Kliwon	86 890	0,63	15,11	18026,97	97,99
Jebres	147 694	1,12	25,68	11740,38	98,01
Banjarsari	183 541	1,29	31,89	12386,97	96,78
Kota Surakarta	575 230	0,97	100,00	13061,53	97,04

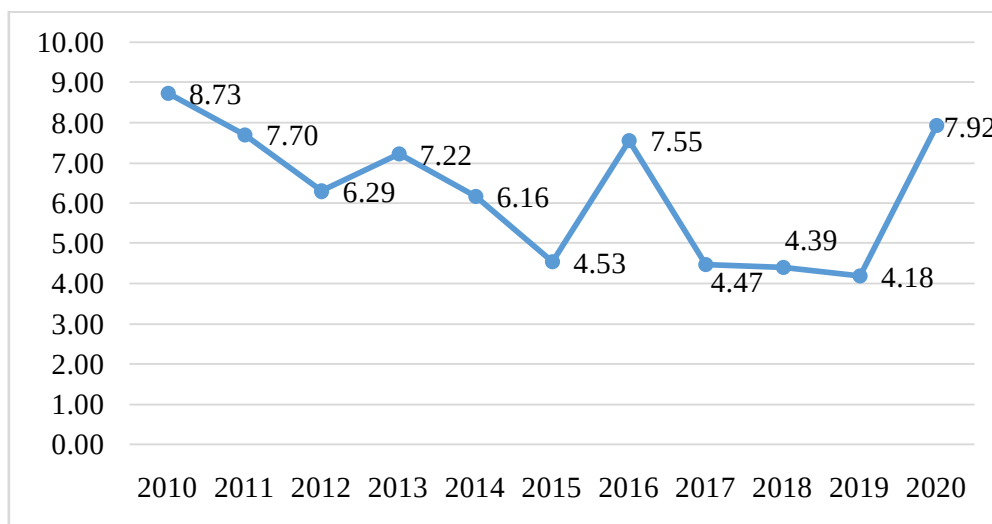
Sumber: Disdukcapil Kota Surakarta, 2021.

Tabel 2.6
Sebaran Penduduk Kota Surakarta Tahun 2020

Kecamatan	Penduduk	Pertumbuhan 2010-2020	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
Laweyan	88.524	0,27	16,95	10.245,83	95,3
Serengan	47.778	0,88	9,15	14.977,43	95,3
Pasar Kliwon	78.517	0,54	15,03	16.289,83	98,4
Jebres	138.775	0,05	26,57	11.031,40	97,9
Banjarsari	168.770	0,68	32,31	11.395,68	96,6
Kota Surakarta	522.364	0,44	100,00	11.861,13	96,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Dari sisi tingkat pengangguran, pada tahun 2019 tingkat pengangguran Surakarta mencapai 4,18% dan tahun 2020 naik tajam menjadi 7,92%. Tingkat pengangguran dihitung dari perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan angkatan kerja. Pengangguran yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena lumpuhnya perekonomian akibat Pandemi Covid. Sepanjang 2010-2020 tingkat pengangguran tertinggi adalah pada tahun 2010 yang mencapai 8,73% dan yang terendah adalah tingkat pengangguran pada tahun 2019. Tingkat pengangguran yang terjadi pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2011.

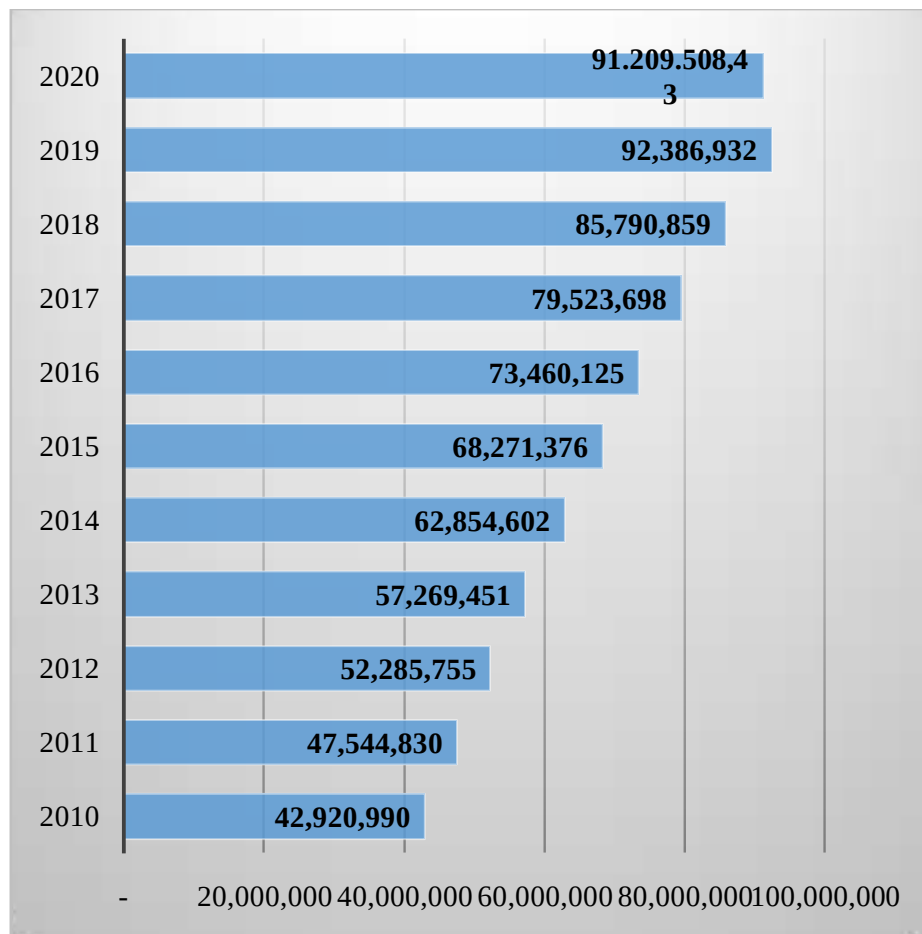


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Gambar 2.3
Tingkat Pengangguran Tahun 2010-2020

2.5. KESEJAHTERAAN

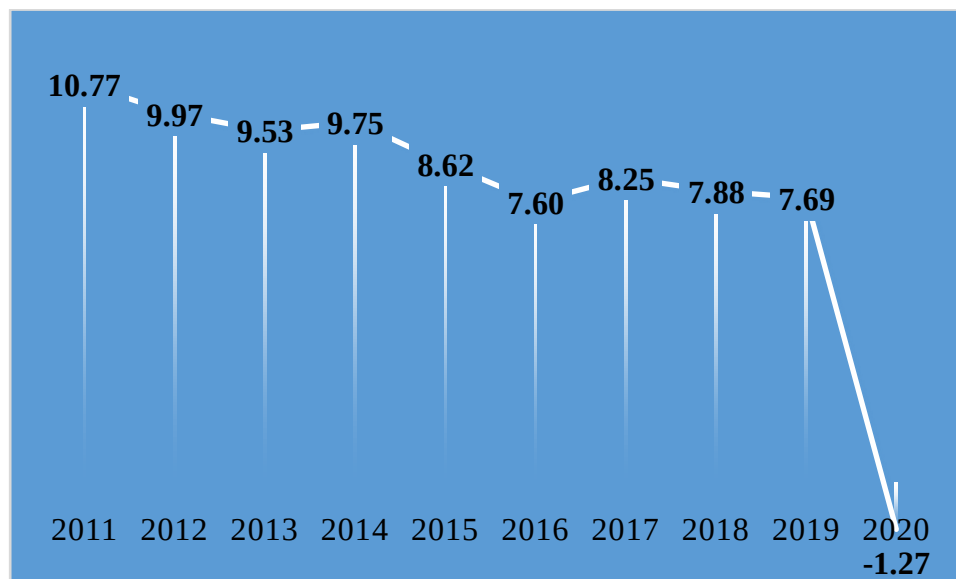
Salah satu indikator kesejahteraan adalah PDRB perkapita yang merupakan perbandingan antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2019 PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga berlaku adalah Rp92,38 juta. Angka ini naik dibandingkan PDRB perkapita tahun 2018 yang mencapai Rp85,6 juta. Hal ini berarti pendapatan per orang per tahun penduduk Surakarta adalah Rp92,38 juta. Di tahun 2020 PDRB perkapita ADHB menunjukkan penurunan menjadi Rp91,20 juta atau turun sebesar - 1,2%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Gambar 2.4
Pendapatan Perkapita Berdasar PDRB ADHB Tahun 2010-2020

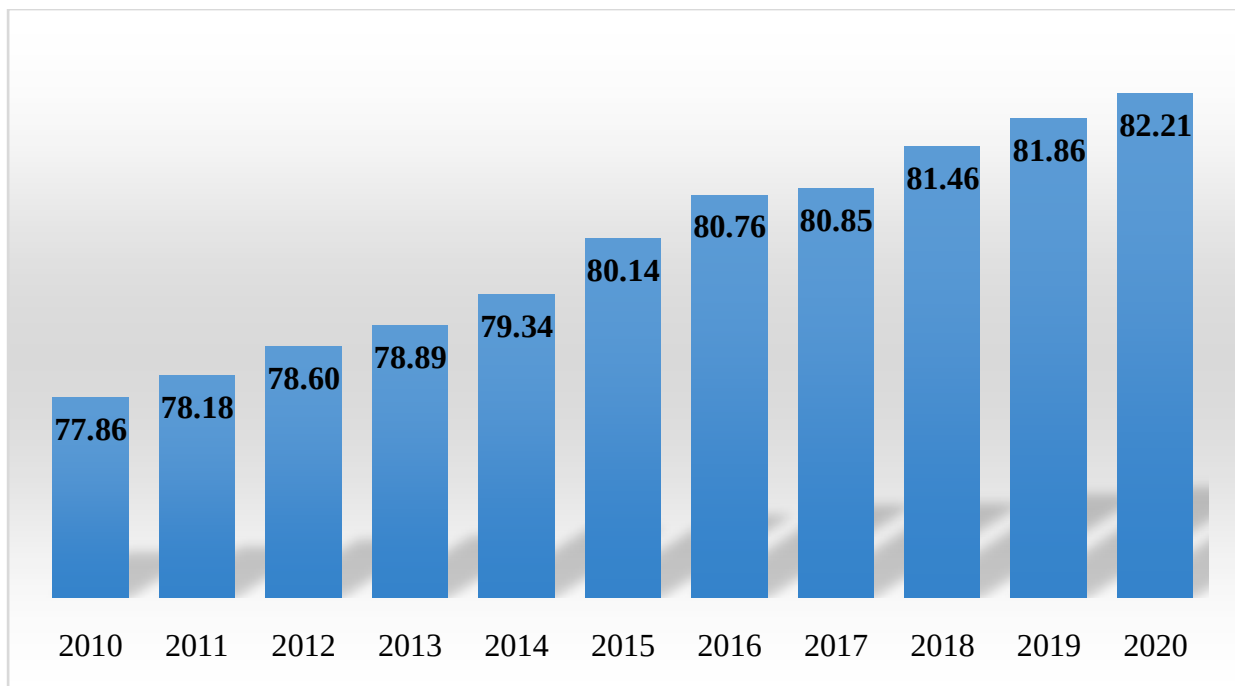
Bila tahun 2020 diabaikan karena situasi yang tidak normal, meskipun selama 2010-2019 PDRB perkapita menunjukkan tren yang terus naik, namun apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB perkapita terlihat tren pertumbuhan semakin menurun. Pertumbuhan pendapatan perkapita sepanjang 2010-2019 angka tertinggi adalah tahun 2011 yaitu sebesar 10,77%. Kenaikan pertumbuhan pendapatan perkapita sepanjang 2010-2019 terjadi dua kali yaitu pada tahun 2014 dari 9,52% di tahun 2013 menjadi 9,73% di tahun 2014 serta tahun 2017 lalu dari 7,60% di tahun 2016 menjadi 8,25% di tahun 2017.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Gambar 2.5
Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Tahun 2011-2020

Dari sisi nilai indeks pembangunan manusia (IPM), pada tahun 2019 nilai IPM Surakarta cukup tinggi yaitu 81,86 dan tahun 2020 naik menjadi 82,21. IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari beberapa ukuran yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, umur harapan hidup, serta pengeluaran perkapita. Sepanjang 2010-2020 nilai IPM menunjukkan kenaikan setiap tahun. Kenaikan yang terendah terjadi pada tahun 2016-2017. Nilai IPM Surakarta ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM provinsi maupun nasional. Hal ini merupakan indikasi bahwa pembangunan sumber daya manusia Surakarta menunjukkan keberhasilan.

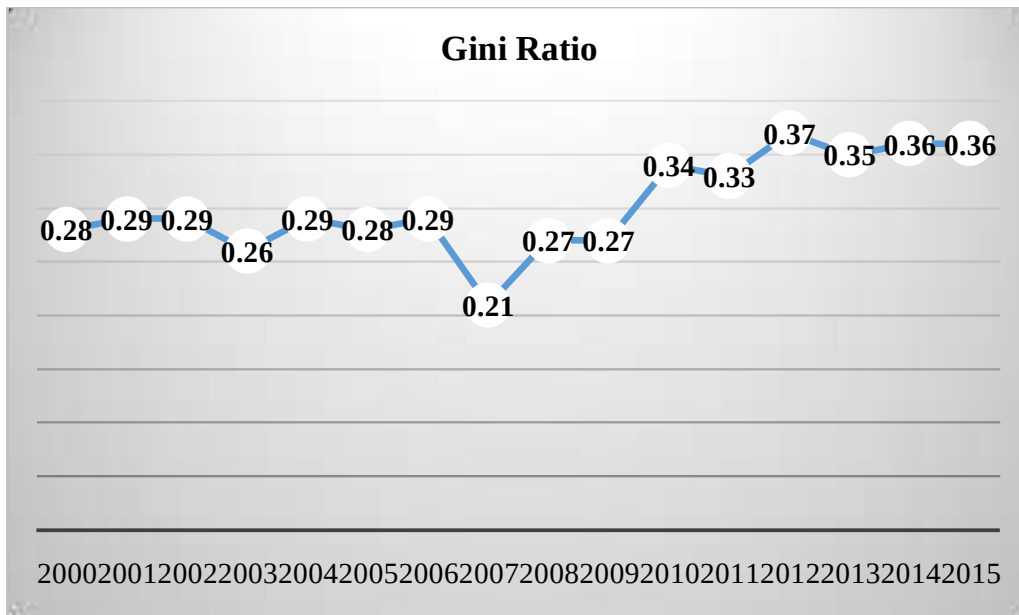


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Gambar 2.6
Perkembangan IPM Kota Surakarta Tahun 2010-2020

Hal yang berbeda terjadi pada ukuran ketimpangan menggunakan Gini Ratio atau Indeks Gini. Ukuran ini menunjukkan indikasi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk. Data indeks Gini tingkat kabupaten/kota yang dirilis oleh BPS terakhir tahun 2015, dan mulai tahun 2016 indeks Gini yang dihitung dan dipublikasikan adalah indeks Gini untuk wilayah provinsi dan nasional.

Data indeks Gini selama 2000-2015 menunjukkan tren kenaikan, yang berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk semakin meningkat. Selama periode tersebut indeks Gini terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 0,21 dan mulai 2010 nilai indeks Gini di atas 0,30.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Gambar 2.7
Perkembangan Gini Ratio Kota Surakarta Tahun 2000-2015

2.6. KEMISKINAN

Kemiskinan Surakarta dapat dilihat dari beberapa indikator seperti garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Dari tinjauan garis kemiskinan, selama 2010-2020 terlihat garis kemiskinan Surakarta menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2020 garis kemiskinan Surakarta adalah Rp487.445, naik bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang besarnya Rp473.516. Jumlah penduduk miskin selama 2010-2019 menunjukkan penurunan khususnya dari 2017 ke 2018, namun dari 2019-2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebagai dampak Pandemi Covid.

Demikian pula halnya dengan tingkat kemiskinan (rasio jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun) yang menunjukkan tren penurunan selama 2010-2019, namun untuk tahun 2020 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan yang cukup tajam menjadi 9,03%.

Dari ukuran kedalaman kemiskinan (P1), selama 2010-2020 terlihat berfluktuasi. Misal pada tahun 2010-2012 terlihat menurun namun pada tahun 2013 kembali naik. Demikian juga yang terjadi di tahun 2015, 2017, dan 2019 yang menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2020 terjadi penurunan indeks P1 yaitu menjadi 1,5 dari tahun

sebelumnya yang tercatat 1,6. Nilai indeks P1 yang semakin kecil menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) selama 2010-2020 juga menunjukkan fluktuasi. Pola fluktuasi antara indeks P1 dengan indeks P2 terlihat sama. Indeks P2 tahun 2019 tercatat 0,48 dan di tahun 2020 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 0,38. Penurunan yang terjadi selama 2019-2020 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian kenaikan garis kemiskinan tidak mampu menjadi factor pendorong turunya indeks P1 dan P2.

Tabel 2.7
Indikator Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2010-2020

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	69,8	64,5	60,7	59,7	55,92	55,71	55,91	54,89	46,99	45,2	47,03
Tingkat Kemiskinan	13,96	12,92	12	11,74	10,95	10,89	10,88	10,65	9,08	8,7	9,03
Indeks Kedalaman Kemiskinan=P1	2.19	1.89	1.33	1.63	1.48	1.74	1.34	1.87	1.47	1.60	1,51
Indeks Keparahen Kemiskinan=P2	0,53	0,46	0,28	0,34	0,3	0,4	0,35	0,44	0,35	0,48	0,38
Garis Kemiskinan	306.584	326.233	361.517	371.918	385.467	406.840	430.293	448.062	464.063	473.516	487.445

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

2.7. PENDIDIKAN

Indikator pendidikan yang dipergunakan dalam evaluasi kebijakan umumnya berupa dua hal yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Secara teoritis APM akan selalu lebih rendah dibandingkan dengan APK. Dari aspek jenjang pendidikan, nilai APK maupun APM SD/MI selama 2010-2019 adalah yang tertinggi dibandingkan jenjang SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Nilai APK pada semua jenjang pendidikan selama 2010-2020 terlihat fluktuatif. Pola yang sama juga terjadi pada APM yang juga fluktuatif sepanjang 2010-2020. Bila diperbandingkan antar jenjang pendidikan, tidak terdapat pola yang sama. Hal ini disebabkan karena APK maupun APM dipengaruhi oleh struktur umur penduduk usia sekolah serta angka partisipasi sekolah. Nilai APK maupun APM Kota Surakarta ini tergolong tinggi dibandingkan daerah lain, meski bukan yang tertinggi. Pada tahun 2020 hanya APK SD yang sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sementara indikator lainnya di tahun 2020 menunjukkan kenaikan.

Tabel 2.8
Indikator Kemiskinan Kota Surakarta Menurut Tingkat Pendidikan Tahun
2010-2020

JENJANG	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD	APK	113,4	99,49	107,97	104,02	105,47	103,6	109,8	110,37	106,56	107,81	105,95
	APM	100	92.75	95.24	96.84	96.95	96.28	98.91	98.91	99.22	99,19	99,20
SMP/MTS	APK	82,14	91,45	98,82	95,25	93,31	89,88	84,81	87,93	84,55	89,03	92,50
	APM	72.62	70.45	82.03	87.92	83.90	78.55	81.28	81.25	79.34	80,60	82,58
SMA/SMK/ MA	APK	92,17	90,77	65,4	65,1	71,25	100,93	110,64	103,55	80,85	77,92	81,43
	APM	65.22	67.17	52.48	60.48	63.87	69.94	63.48	65.41	65.26	66,12	67,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021.

BAB III

KONSEP DAN METODOLOGI

3.1. PDRB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

PDRB diartikan sebagai nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian daerah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB dihitung dengan pendekatan pendapatan, pendekatan hasil produksi, serta pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan yang menghitung PDRB dari empat komponen pendapatan (upah/gaji, bunga, sewa, dan laba) belum dipergunakan di Indonesia, sehingga pendapatan nasional maupun PDRB menggunakan pendekatan hasil produksi dari sektor ekonomi atau lapangan usaha, serta pendekatan pengeluaran dari empat sektor (rumah tangga, swasta, pemerintah, dan luar negeri).

PDRB dihitung menggunakan dasar harga berlaku (*current price*) dan harga konstan (*constant price*). PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku disebut juga dengan PDRB nominal, sehingga nilai output dihitung berdasarkan harga yang berlaku saat itu. Sebaliknya, PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga konstan disebut juga dengan PDRB riil karena nilai output dihitung berdasarkan patokan harga pada tahun tertentu (tahun dasar). PDRB ini disebut dengan PDRB riil karena secara riil mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan output dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi). PDRB atas dasar harga konstan ini dijadikan dasar dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan nilai output dari satu periode ke periode berikutnya.

PDRB dengan menggunakan hasil produksi merupakan PDRB yang dihitung berdasarkan nilai output dari 17 sektor ekonomi. Secara matematis, PDRB ini dihitung dengan cara:

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

$$Y = \text{PDRB}$$

$$P_i = \text{Harga produk untuk produk ke } i=1 \dots n$$

$$Q_i = \text{kuantitas produk untuk produk ke } i=1 \dots n$$

Sementara itu untuk PDRB yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran dihitung dari penjumlahan:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Y = PDRB

C = konsumsi (pengeluaran) rumah tangga

I = konsumsi (pengeluaran) swasta

G = konsumsi (pengeluaran) pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, dipergunakan formula:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t = Nilai PDRB harga konstan pada tahun tertentu

PDRB_{t-1} = Nilai PDRB harga konstan pada satu tahun sebelumnya.

Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata pertumbuhan PDRB dalam kurun waktu tertentu, dipergunakan formula:

$$\text{Rata-rata pertumbuhan PDRB} = \left(\frac{Y_t}{Y_o} \right)^{1/n} - 1$$

Y_t = Nilai PDRB tahun terakhir

Y_o = Nilai PDRB tahun paling awal

N = jumlah periode waktu

Apabila nilai PDRB diganti dengan nilai komponen sektor ekonomi, maka akan diperoleh informasi pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi tertentu dari 17 sektor .

3.2. DEMOGRAFI DAN KETENAGAKERJAAN

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pengertian “bekerja” menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Menurut BPS, penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung dengan cara:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

3.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar.

Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan

peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan menggunakan metode baru BPS, IPM dihitung berdasarkan 4 ukuran yang meliputi: (1) angka harapan hidup, (2) harapan lama sekolah, (3) rata-rata lama sekolah, serta (4) pengeluaran perkapita. Angka melek huruf dalam metode baru IPM dihilangkan karena dianggap sudah kurang relevan lagi saat ini.

Nilai maksimum dan minimum komponen IPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Metode Baru

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 ** (Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

3.4. KEUANGAN DAERAH

3.4.1. Analisis Pendapatan Daerah

Dalam analisis ini akan dilakukan penghitungan berbagai rasio APBD yang mampu menggambarkan kinerja APBD dari berbagai sisi: seperti derajat kemandirian fiskal, efisiensi, efektivitas, aktivitas, dan sebagainya. Berdasarkan pengukuran rasio, akan diperoleh informasi kinerja APBD dari tahun ke tahun, termasuk kesesuaian dengan berbagai indikator sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundangan. Analisis ini meliputi antara lain:

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

- Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase.
- Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar.
- Menilai signifikansi selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan.
- Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan

2. Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis proporsi dan pertumbuhan dimaksudkan untuk melihat perkembangan proporsi dari waktu ke waktu. Proporsi dalam hal ini adalah perbandingan antara komponen APBD terhadap total APBD (misal: nilai PAD terhadap Pendapatan Daerah), atau sub komponen APBD (misal: total nilai pajak terhadap PAD atau terhadap total pendapatan). Dengan melihat proporsi, dapat diungkapkan struktur APBD pada periode tertentu serta membandingkan nilai proporsi antar komponen APBD. Proporsi dihitung dengan menggunakan formula berikut:

A

$$\text{Proporsi Komponen APBD} = \frac{\text{Komponen APBD}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

nalisis

pertumbuhan dimaksudkan untuk melihat pertumbuhan komponen APBD maupun total APBD dari waktu ke waktu. Berdasarkan informasi ini, akan diketahui tren atau kecenderungan pertumbuhan setiap komponen APBD sehingga dapat terungkap informasi perbandingan pertumbuhan antar komponen APBD. Apabila pertumbuhannya negatif, maka keadaan itu menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebabnya. Pendapatan pada formula berikut dapat digunakan untuk PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Transfer. Pertumbuhan Komponen dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{Pertumbuhan Komponen APBD} = \frac{\text{Komponen APBD}_t - \text{Komponen APBD}_{t-1}}{\text{Komponen APBD}_{t-1}} \times 100\%$$

3. Rasio keuangan

a. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan terhadap dana dari pihak eksternal, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kemandirian daerah dapat dikategorikan **tinggi** jika nilai rasio kemandiriannya diatas 75%; **sedang** jika nilai rasio kemandiriannya lebih dari 50% sampai dengan 75%; **rendah** jika nilai rasio lebih dari 25% sampai dengan 50%, dan **rendah** jika nilai rasio kurang dari 25%.

b. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

c. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi kontribusi PAD pada Total Pendapatan Daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

d. Rasio Efektivitas PAD

Analisis efektivitas adalah kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 kriteria nilai efektifitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika nilai rasionya di atas 100%, efektif jika nilai rasionya lebih dari 90% sampai dengan 100%, cukup efektif jika nilai rasionya lebih dari 80% sampai dengan 90%, kurang efektif jika nilai rasionya lebih dari 60% sampai dengan 80%, dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang atau sama dengan 60%.

e. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi menggambarkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memungut PAD. Semakin besar nilai rasio menunjukkan semakin inefisien. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Memperoleh PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, lebih dari 90% sampai dengan 100% adalah kurang efisien, lebih dari 80% sampai dengan 90% adalah cukup efisien, lebih dari 60% sampai dengan 80% adalah efisien dan kurang dari atau sama dengan 60% adalah sangat efisien.

f. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas Pajak Daerah adalah kemampuan Pemda dalam merealisasikan penerimaan dari Pajak Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

g. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memungut Pajak Daerah. Semakin besar nilai rasio menunjukkan semakin inefisien. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Memperoleh Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

h. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari total penerimaan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

i. Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*)

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) diperlukan bila pemerintah daerah bermaksud untuk melakukan hutang jangka panjang. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{[\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}] - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil seperti bagi hasil SDA
DBHDR	: Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
Belanja Wajib	: Belanja Pegawai dan Belanja Anggota DPRD
Biaya Lain	: Biaya terkait pengadaan pinjaman antara lain: Biaya Administrasi, Biaya Provisi, Biaya Komitmen, Asuransi, dan Denda

3.4.2. Analisis Belanja

Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Analisis belanja daerah pada umumnya meliputi:

1. Analisis Varians Belanja

Varians Belanja dihitung dengan menghitung selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Hal yang penting dalam analisis varians adalah:

- a. Mempertanyakan alasan terjadinya varians. Apakah selisih tersebut cukup beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan?
- b. Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atau tidak?
- c. Berapa tingkat selisih (variens) yang bisaditoleransi?

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun. Pada umumnya perkembangan belanja cenderung untuk selalu meningkat. Analisis pertumbuhan digunakan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Formula yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan adalah:

$$\text{Pertumbuhan Belanja th t} = \frac{\text{Realisasi Belanja th t} - \text{Realisasi Belanja th (t-1)}}{\text{Realisasi Belanja th (t-1)}} \times 100\%$$

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

- a. Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja

Rasio Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Yang dimaksud fungsi di sini, dapat berupa:

- Pelayanan Umum Pemerintahan
- Ketertiban dan Keamanan
- Ekonomi

- Lingkungan Hidup
- Perumahan dan Fasilitas Umum
- Kesehatan
- Pariwisata dan Budaya
- Pendidikan
- Perlindungan Sosial

b. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dan total belanja daerah dan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

c. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara Total Realisasi Belanja Modal dengan Total Belanja daerah dan dirumuskan seperti berikut ini:

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

d. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Analisis proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (*cost & budgetary control*). Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Belanja Langsung thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

a. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total realisasi belanja daerah dengan total PDRB. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah dan dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Belanja Daerah thd PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

3.4.3. Analisis Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya. Sistem anggaran tradisional yang bersifat *incrementalism* dan *line-item* dengan pendekatan anggaran berimbang (*balanced budget*) menilai kinerja berdasarkan habis tidaknya anggaran. Jika suatu unit kerja dapat menghabiskan anggarannya, maka unit kerja tersebut dinilai berhasil. Sekarang, kinerja anggaran tidak lagi didasarkan pada habis tidaknya anggaran, tetapi diukur dari tercapai tidaknya target kinerja dengan anggaran yang disediakan. Dengan demikian maka adanya sisa anggaran tidak berarti jelek.

Pos Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dapat diketahui pada akhir periode anggaran dan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{SiLPA} &= (\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Realisasi Belanja}) + (\text{Realisasi Penerimaan} \\ &\quad \text{Pembiayaan} - \text{Realisasi Pengeluaran Pembiayaan}) \\ &= \text{Realisasi Penerimaan Daerah} - \text{Realisasi Pengeluaran Daerah}\end{aligned}$$

3.5. KEMISKINAN

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Kondisi kemiskinan menurut BPS dapat diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

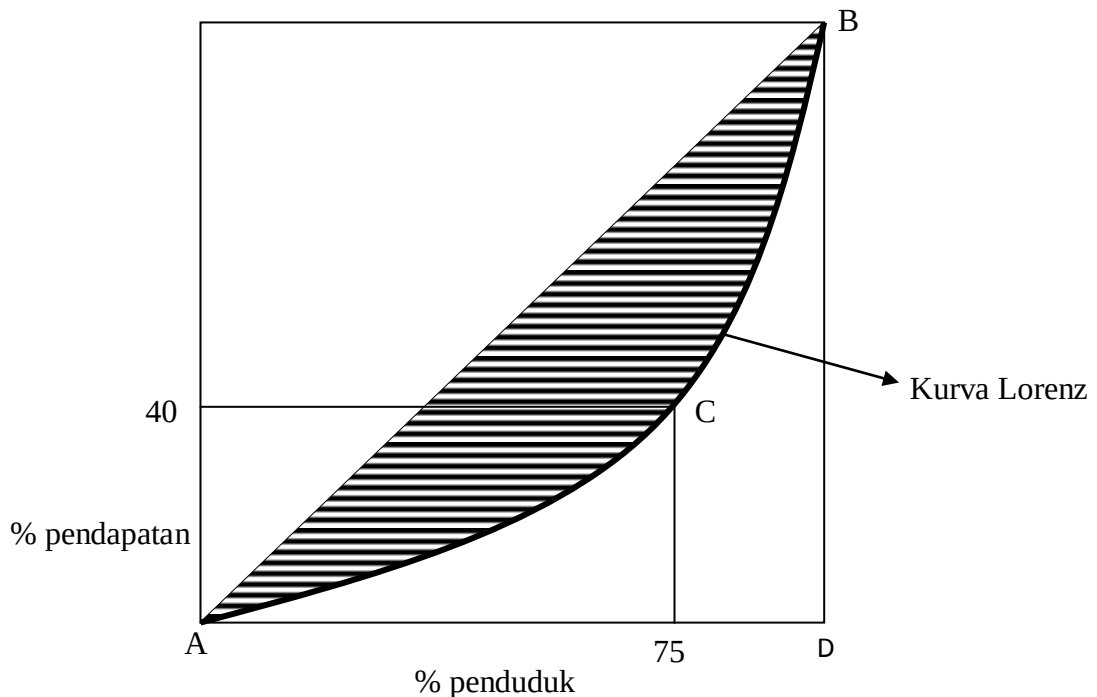
3.6. KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Pendapatan per kapita diukur dengan cara membagi PDB atau PNB dengan jumlah penduduk. PDB atau PNB yang dipergunakan bisa berupa PDB atau PNB riil (atas dasar harga konstan), bisa pula PDB atau PNB harga berlaku. Jumlah penduduk yang dipergunakan adalah jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan per kapita dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara umum. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula kemakmuran penduduk wilayah tersebut. Pendapatan perkapita tidak memiliki hubungan dengan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, artinya Negara yang pendapatan perkapita nya tinggi, bisa saja ketimpangannya juga tinggi. Bila hal tersebut terjadi, berarti struktur ekonomi

wilayah tersebut masih tergantung pada sekelompok masyarakat tertentu. Analisis ketimpangan diperlukan mengingat apakah hasil pembangunan daerah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan lebih adil. Bila indeks ini semakin baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat baik antar individu dan wilayahnya akan semakin membaik pula.

Ketimpangan diukur dengan menggunakan Gini Ratio, yang diturunkan dari Kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, berarti kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, dan distribusi pendapatan semakin semakin tidak merata (ketimpangan semakin tajam).



Sumber: Suryana, 2000.

Gambar 3.2

Kurva Kuznets

Contoh di atas: 75% penduduk menguasai 40% pendapatan (berarti 25% penduduk menguasai 60% pendapatan). Koefisien Gini= ABC/ABD

Selain itu ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar wilayah dapat diukur dengan indeks Williamson sebagai berikut:

$$\text{Indek Williamson (IW)} = \left\{ \frac{\{(Y - Y_i)^2 F_i/N\}}{Y} \right\}^{0,5}$$

Di mana

Y = income riil per kapita Kabupaten

Y_i = income perkapita kecamatan

F_i = jumlah penduduk kecamatan

N = jumlah penduduk kabupaten

Dari analisis ini selanjutnya dapat pula dibuat tipologi klasen dengan 4 kuadran

- a. Ketimpangan tinggi dan kemiskinan tinggi
- b. Ketimpangan tinggi dan kemiskinan rendah
- c. Ketimpangan rendah dan kemiskinan tinggi
- d. Ketimpangan rendah dan kemiskinan rendah

3.7. SUMBER DATA

Data dalam kajian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari berbagai pihak, seperti: (1) Badan Pusat Statistik, (2) Bappeda, (3) RPJMD Kota Surakarta, (4) LAKIP, (5) SKPD dan Kementerian terkait yang dipandang relevan dengan kajian. Data yang bersumber dari BPS berupa dokumen: (1) Daerah Dalam Angka beberapa tahun terbitan, (2) PDRB Kota Surakarta terbitan terakhir, dan (3) Statistik Daerah.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. ANALISIS KINERJA MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA

4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Surakarta pada tahun 2010 mencapai Rp21,49 triliun dan pada tahun 2019 naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp48 triliun, namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebagai akibat pandemi Covid-19 sehingga PDRB ADHB Kota Surakarta turun menjadi Rp47,6 triliun atau turun sebesar -0,75% dibanding tahun 2019. Pada masa pasca pandemic Covid-19, yaitu pada tahun 2021 PDRB ADHB Kota Surakarta mengalami peningkatan sebesar 4,01% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut menjadi pertanda bahwa perekonomian Surakarta berangsur-angsur pulih pada masa pasca pandemi Covid-19.

Secara relatif, dari tahun 2020 sektor yang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 adalah sektor Industri Pengolahan dari -4,01% menjadi 6,13%; Pengadaan Listrik dan Gas dari 1,59% menjadi 6,85%; Perdagangan Besar dan Eceran dari -5,18% menjadi 5,75%; Transportasi dan Pergudangan dari -62,54% menjadi 3,46%; Akomodasi dari -16,2% menjadi 8,43%; serta Jasa Keuangan dan Asuransi dari 2,13% menjadi 2,28%.

Bila dihitung pada periode 2019-2020 yaitu masa pandemi Covid-19, sektor informasi dan komunikasi pada PDRB ADHB menunjukkan kenaikan tertinggi yaitu 20,21% disusul kemudian sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 16,32%. Sementara itu pada periode yang sama, sektor dengan penurunan terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar -60,63% serta sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar -16,05%. Penurunan tersebut memiliki keterkaitan erat Kota Surakarta sebagai salah satu destinasi wisata dan kota perdagangan, sehingga aspek transportasi serta akomodasi makanan dan minum terdampak langsung secara signifikan.

Dari sisi struktur PDRB, pada tahun 2021 PDRB Surakarta didominasi oleh 4 sektor utama, yaitu sektor konstruksi (26,65%), sektor perdagangan besar dan eceran (21,96%), sektor informasi dan komunikasi (14,86%), serta sektor industri pengolahan (8,66%). Proporsi sektor tersebut selama 2012-2021 meski berfluktuasi namun cenderung konstan. Sektor konstruksi, perdagangan besar, serta industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan di tahun 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara sektor informasi dan komunikasi menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode

sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh saat pandemi, sektor tersebut menjadi salah satu sektor yang tumbuh dengan signifikan seiring dengan kebutuhan komunikasi yang meningkat drastis di masa pandemi. Namun saat kondisi mulai berangsur pulih dan kegiatan mulai berjalan normal pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi mulai menurun.

Tabel 4.1
Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011-2020

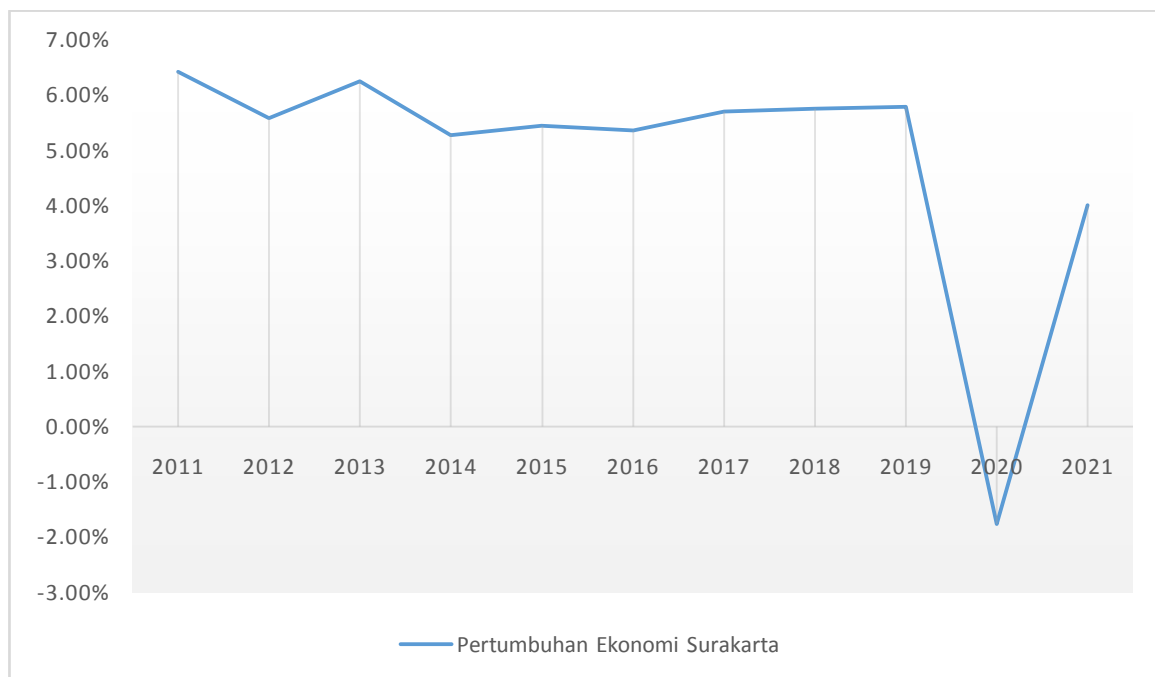
Lapangan Usaha	Proporsi				Pertumbuhan				2020-2021		TREN 2012-2021	
	2012	2019	2020	2021	2012	2019	2020	2021	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51	0,49	0,51	0,50	2,40	2,96	1,93	2,14	Turun	Naik	Turun	Turun
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	-64,49	-6,15	-14,77	Turun	Turun	Turun	Turun
C. Industri Pengolahan	8,27	8,46	8,44	8,66	7,35	5,88	-4,01	6,13	Naik	Naik	Naik	Turun
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,20	0,20	0,21	12,55	5,21	1,59	6,85	Naik	Naik	Turun	Turun
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,14	0,16	0,14	-2,54	4,74	3,22	-4,30	Turun	Turun	Turun	Turun
F. Konstruksi	26,99	27,10	27,04	26,65	5,45	4,61	-1,97	0,69	Turun	Naik	Turun	Turun
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,34	22,16	21,64	21,96	2,06	5,18	-5,18	5,75	Naik	Naik	Turun	Naik
H. Transportasi dan Pergudangan	2,42	2,59	1,03	1,04	6,44	7,32	-62,54	3,46	Naik	Naik	Turun	Turun
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,36	5,41	4,55	4,72	7,82	5,21	-16,20	8,43	Naik	Naik	Turun	Naik
J. Informasi dan Komunikasi	11,23	12,01	14,55	14,86	11,81	10,12	19,70	7,68	Naik	Turun	Naik	Turun
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,71	3,76	3,90	3,91	2,98	4,44	2,13	2,28	Naik	Naik	Naik	Turun
L. Real Estate	4,09	3,85	3,97	3,92	7,07	2,98	0,43	3,42	Turun	Naik	Turun	Turun
M,N. Jasa Perusahaan	0,69	0,86	0,81	0,80	7,18	9,53	-8,53	2,19	Turun	Naik	Naik	Turun
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,17	5,41	5,39	5,11	1,66	3,90	-2,15	-0,19	Turun	Naik	Turun	Turun
P. Jasa Pendidikan	4,87	5,51	5,65	5,44	10,56	5,98	-0,96	0,13	Turun	Naik	Naik	Turun
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,12	1,31	1,26	7,49	6,19	12,11	1,22	Turun	Turun	Naik	Turun
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,95	0,95	0,85	0,81	4,35	7,44	-14,32	0,07	Turun	Naik	Turun	Turun
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	5,58	5,77	-1,76	4,01				

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, diolah.

Berdasarkan Tabel 4.1 dari tahun 2012 sektor industri pengolahan menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2012 hingga 2021 dengan kenaikan kontribusi dari 8,27% di tahun 2012 menjadi 8,66% di tahun 2021, sektor informasi dan komunikasi menunjukkan peningkatan yang cukup besar yaitu dari 11,23% menjadi 14,86%, sektor jasa keuangan dan asuransi (3,71% menjadi 3,91%), sektor jasa perusahaan (dari 0,69% menjadi 0,80%), sektor jasa pendidikan (dari 4,87% menjadi 5,44%), serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (dari 1,01% menjadi 1,26%). Di tahun 2021 beberapa sektor yang menunjukkan penurunan proporsi meski tidak secara signifikan dibandingkan tahun 2012, yaitu sektor pertanian dari 0,51% menjadi 0,50%, sektor pengadaan listrik dan gas dari 0,22% menjadi 0,21%, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang dari 0,19% menjadi 0,14%, sektor transportasi dan pergudangan dari 2,42% menjadi 1,04%, penyediaan akomodasi makan dan minuman dari 5,36% menjadi 4,72%. Pada sektor transportasi dan akomodasi, penurunan

tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan pada kedua sektor tersebut, namun jika dibandingkan dengan tahun 2020, kedua sektor tersebut telah menunjukkan peningkatan proporsi.

Selama 2011-2020 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta secara perlahan menunjukkan tren yang menurun meskipun relative kecil. Meskipun tren 2014-2019 cenderung konstan. Posisi Kota Surakarta sebagai salah satu kota wisata dan budaya, perdagangan, serta Pendidikan membuat cukup rentan terhadap guncangan factor eksternal, terlebih posisi geografis Kota Surakarta yang strategis. Hal tersebut yang menyebabkan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun pada tahun 2021, telah terjadi peningkatan yang menjadi tanda bahwa perekonomian Kota Surakarta mulai kembali pulih pada masa pasca Pandemi Covid-19.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Gambar 4.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2010-2020

4.1.2. PDRB Perkapita

PDRB atas dasar harga berlaku apabila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menghasilkan PDRB Perkapita nominal. Jumlah penduduk didasarkan pada data BPS Kota Surakarta. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan pendapatan per orang per tahun. Berdasarkan perhitungan

PDRB ADHB, selama 2010-2021 PDRB perkapita Kota Surakarta menunjukkan tren yang terus meningkat. Kenaikan tiap tahun PDRB perkapita sepanjang 2010-2021 terlihat berfluktuasi. Hanya pada tahun 2020, PDRB perkapita mengalami koreksi. Terdampaknya perekonomian Kota Surakarta tersebut membuat perekonomian tertekan dan di saat yang sama hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk Kota Surakarta. PDRB perkapita ADHB tahun 2020 1,03%. Pada tahun 2021 PDRB perkapita ADHB sebesar Rp96,36 juta, naik sebesar 5,7%. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut menandakan bahwa sektor-sektor perekonomian mulai bangkit. Pemerintah telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 4.2

PDRB Perkapita Kota Surakarta Tahun 2010-2021

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta (BPS)	42.920.990	47.544.830	52.285.755	57.269.451	62.854.602	68.271.376	73.460.125	79.523.698	85.790.562	92.380.515	91.165.970	96.362.858
	Surakarta (Disdikcapil)												
2	Provinsi Jawa Tengah	19.209.309	21.162.830	22.895.435	24.952.127	27.517.837	29.933.748	31.961.952	34.234.314	36.770.961	39.200.188	38.578.125	38.669.113
3	Indonesia	28.778.100	32.363.700	35.105.100	38.365.900	41.915.900	45.140.700	47.957.400	51.000.000	56.000.000	59.100.000	57.120.389	62.236.444
4	Rata-rata Jawa Tengah	15.368.100	17.075.704	18.526.095	20.239.953	22.367.477	24.462.155	26.465.404	28.368.392	30.529.582	32.586.899	32.528.485	32.322.414
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	30.438.448	33.307.502	36.801.468	40.135.783	44.074.347	47.845.027	51.659.040	55.685.731	59.959.505	64.278.469	63.375.107	66.886.344

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

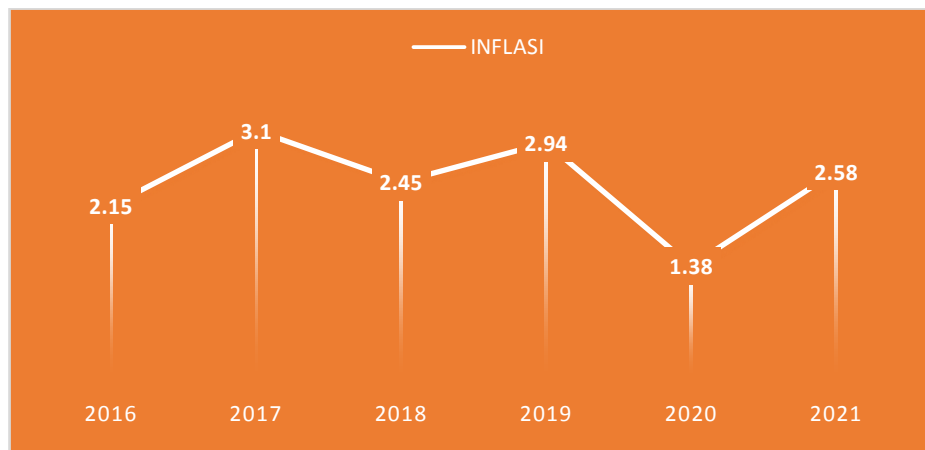
Bila dibandingkan dengan wilayah lain, penurunan PDRB perkapita ADHK Kota Surakarta masih lebih kecil dibandingkan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup besar yaitu -7,44%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah yang pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB perkapita sebesar -6,99%. Bila dibandingkan secara nasional, pada tahun 2020 PDRB perkapita nasional juga menunjukkan penurunan yang lebih besar bila dibandingkan dengan Kota Surakarta yaitu -2,84%. Bila diperbandingkan antar kota di Jawa Tengah, penurunan PDRB perkapita Kota Surakarta hanya lebih rendah bila dibandingkan dengan Kota Tegal yang mengalami penurunan sebesar -10,79%.

Nilai PDRB perkapita Kota Surakarta jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional serta rata-rata kota di Jawa Tengah, jauh berada di atas. PDRB perkapita Kota Surakarta menduduki peringkat 2 di bawah Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi. Dengan demikian, iklim perekonomian di Kota Surakarta dapat dikatakan berjalan sangat dinamis. Dinamika perekonomian tersebut di sisi lain diimbangi dengan kemampuan Kota Surakarta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sehingga menghasilkan PDRB perkapita yang tinggi sepanjang 2010-2021.

4.1.3. Inflasi

Sepanjang 2016-2021 inflasi di Surakarta berfluktuasi. Selama periode tersebut inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai hanya 1,38% dan yang tertinggi adalah tahun 2017 yang mencapai 3,1%. Penurunan inflasi yang sangat tajam terjadi pada tahun 2020, yaitu dari 2,94% di tahun 2019 menjadi 1,38% di tahun 2020. Inflasi tahun 2021 tercatat sebesar 2,58% dan angka ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2020.

Pada tahun 2020 inflasi tercatat sebesar 1,38% sebagai akibat pandemic Covid-19. Situasi dan kondisi pandemi Covid mendorong perekonomian berjalan stagnan bahkan menurun. Kelesuan ekonomi tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat khususnya kelompok menengah bawah akibat penurunan sumber penghasilan, sehingga mendorong penurunan inflasi di tahun 2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2022

Gambar 4.3

Perkembangan Laju Inflasi (%) Tahun 2016-2021

Pada tahun 2021, semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau 3,22 persen, kelompok pakaian dan alas kaki 0,70 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 2,08 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 2,69 persen, kelompok kesehatan 12,93 persen, kelompok transportasi 1,16 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,31 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 3,12 persen, kelompok pendidikan 5,35 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,26 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 2,65 persen.

Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi di Kota Surakarta selamatahun 2021 antara lain : minyak goreng, akademi/ perguruan tinggi, tarip rumah sakit, besibeton, cabai rawit, kontrak rumah, rokok kretek filter, sekolah dasar, tarip dokter umumdan rekreasi. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan sumbangan deflasi di KotaSurakarta selama tahun 2021 antara lain : cabai merah, mobil, telur ayam ras, pasir,bandeng diawetkan, bawang merah, tahu mentah, bawang putih, pisang dan emasperhiasan.

Tabel 4.3
Inflasi Tahun 2021

Kelompok Barang dan Jasa	Inflasi (%)
Makanan, minuman, dan tembakau	3,22
Pakaian dan alas kaki	0,7
Perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga	2,08
Perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga	2,69
Kesehatan	12,93
Transportasi	1,16
Informasi, komunikasi, jasa keuangan	0,31
Rekreasi, olah raga, budaya	3,12
Pendidikan	5,35
Peyediaan makanan dan minuman/restoran	1,25
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	2,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2022.

4.1.4. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam kemiskinan, terdapat dua ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Tingkat kemiskinan Surakarta selama 2010-2019 terlihat menunjukkan tren penurunan dari 13,96% di tahun 2010 menjadi 8,7% di tahun 2019. Namun di tahun 2020 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 9,03% dan kembali meningkat menjadi 9.4% di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk miskin tahun 2020 yang mengalami kenaikan dibandingkan 2019, dari 45.200 menjadi 47.030. Kenaikan jumlah penduduk miskin disebabkan karena penurunan bahkan hilangnya penghasilan akibat situasi pandemic Covid 19 sementara garis kemiskinan sebagai batas antara kelompok miskin dan tidak miskin di tahun 2020 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2021, meskipun sektor-sektor perekonomian mulai menunjukkan pemulihan namun tidak serta merta mengurangi jumlah penduduk miskin di Surakarta.

Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2021 Kota Surakarta memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan atau P1 sebesar 1,83 sedangkan nilai indeks keparahan kemiskinan atau P2 sebesar 0,54, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Indeks P1 menunjukkan besarnya pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan, sehingga menurunnya angka P1 tersebut diduga karena banyaknya kelompok miskin baru yang sebelumnya di atas garis kemiskinan, namun saat itu berada tidak jauh di bawah garis kemiskinan.

Tabel 4.4
Indikator Kemiskinan Surakarta Tahun 2010-2021

TINGKAT KEMISKINAN

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	13,96	12,92	12,00	11,74	10,95	10,89	10,88	10,65	9,08	8,70	9,03	9,40
2	Provinsi Jawa Tengah	16,11	16,21	14,98	14,44	13,58	13,58	13,27	13,01	11,32	10,80	11,41	11,79
3	Indonesia	13,90	12,36	11,66	14,47	10,96	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71
4	Rata-rata Jawa Tengah	13,76	13,92	12,84	12,30	11,56	11,52	11,25	10,99	9,67	9,27	9,83	10,22
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	8,77	9,03	8,32	7,81	7,41	7,31	7,05	6,83	6,24	6,03	6,36	6,64

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN=P1

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	2,19	1,89	1,33	1,63	1,48	1,74	1,34	1,87	1,47	1,6	1,51	1,83
2	Provinsi Jawa Tengah	2,62	2,58	2,39	2,37	2,09	2,44	2,37	2,21	1,85	1,53	1,72	1,91
3	Indonesia	2,21	2,08	1,90	1,89	1,75	1,84	1,74	1,79	1,63	1,55	1,75	1,67
4	Rata-rata Jawa Tengah	2,26	2,24	1,89	1,84	1,70	1,98	1,88	1,77	1,57	1,23	1,39	1,62
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	1,33	1,39	1,04	1,04	0,98	1,06	0,92	1,06	0,96	0,96	1,01	1,05

INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN=P2

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	0,53	0,46	0,28	0,34	0,3	0,4	0,35	0,44	0,35	0,48	0,38	0,54
2	Provinsi Jawa Tengah	0,68	0,66	0,57	0,59	0,51	0,65	0,63	0,57	0,45	0,3	0,34	0,45
3	Indonesia	0,58	0,55	0,48	0,48	0,44	0,51	0,44	0,46	0,41	0,37	0,47	0,42
4	Rata-rata Jawa Tengah	0,55	0,53	0,41	0,40	0,38	0,49	0,46	0,42	0,36	0,23	0,26	0,37
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	0,30	0,34	0,20	0,21	0,22	0,23	0,19	0,25	0,21	0,21	0,22	0,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Penurunan tingkat kemiskinan (P0) tidak diikuti dengan penurunan P1 dan P2, P1 dan P2 memiliki fluktuasi yang sama. Koefisien korelasi P0 dengan P1 adalah 0,56; P0 dengan P2 adalah 0,22; dan P1 dengan P2 0,84. Bila dikaitkan dengan PDRB ADHK, selama 2010-2020 pola antara PDRB dengan jumlah penduduk miskin memiliki karakteristik berbanding terbalik, yang berarti semakin tinggi PDRB semakin berkurang jumlah penduduk miskin. Nilai koefisien korelasi keduanya adalah $r=0,96$ dengan nilai koefisien determinasi disesuaikan (r^2 adjusted)=0,92. Hal ini berarti kenaikan PDRB di Surakarta membawa dampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Bila PDRB ADHK naik sebesar 5% (perekonomian tumbuh sebesar 5%) dari 34.827.188 (jutaan) menjadi 36.568.547 (jutaan), maka ditaksir jumlah penduduk miskin akan turun dari 47.030 menjadi 44.060.



Gambar 4.4
Hubungan P0 – P1 – P2 Kota Surakarta 2010-202

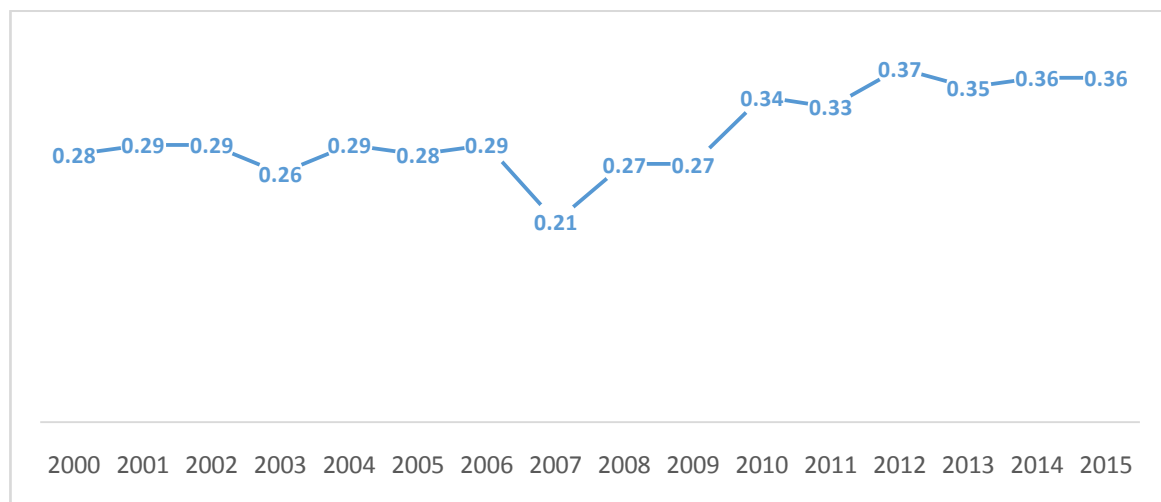
<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,964656
R Square	0,93056
Adjusted R Square	0,922845
Standard Error	2,111899
Observations	11

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	99,21459	3,983293	24,90768	1,3E-09
PDRB-ADHK	-1,5E-06	1,37E-07	-10,9822	1,63E-06

Dengan demikian pengurangan jumlah penduduk miskin yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, tidak cukup dilakukan hanya melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan membawa dampak pada pengurangan tingkat kemiskinan, namun perlu kebijakan yang mampu mendukung mekanisme transmisi terhadap pemberdayaan penduduk miskin.

Untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Surakarta, dapat dilihat berdasarkan Gini ratio atau indeks Gini, atau bias juga dilihat menggunakan Indeks Williamson. Berdasarkan nilai indeks Gini, nilai indeks Gini Surakarta tahun 2015 adalah 0,360 dan kondisi tersebut tidak berbeda dibandingkan tahun 2014. Angka indeks Gini yang di atas 0,30 merupakan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Secara grafis terlihat bahwa tingkat ketimpangan di Surakarta menunjukkan tren yang meningkat

sepanjang 2000-2015. Dengan demikian peningkatan pertumbuhan ekonomi Surakarta belum memberikan dampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016.

Gambar 4.5
Indes Gini Kota Surakarta Tahun 2000-2015

Data indeks Gini di daerah hingga saat ini hanya terdapat sampai tahun 2015 dan BPS hanya melakukan perhitungan indeks Gini pada level provinsi dan nasional. Hal ini membuat Surakarta mengalami kesulitan untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat ketimpangan yang terjadi. Untuk itu, alternative yang dapat dilakukan adalah menggunakan indeks Williamson atau melakukan konversi dari indeks Williamson ke indeks Gini.

Bila dilakukan prediksi Indeks Gini menggunakan beberapa pendekatan, maka nilai indeks Gini Kota Surakarta pada tahun 2020 diprakiran antara 0,357 s.d. 0,390. Prediksi menggunakan metode rata-rata bergerak 2 dan 3 periode menghasilkan angka yang tidak jauh berbeda.

Prediksi	2020
Least Square	0,38
Moving Average-3 periode	0,36
Moving Average-2 periode	0,36

Nilai Indeks Gini Kota Surakarta lebih rendah dibandingkan dengan indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Tahun 2015 misalnya, nilai indes Gini Jawa Tengah sebesar 0,382 dan nasional sebesar 0,402. Angka tersebut jauh lebh tinggi dibandingkan

dengan Kota Surakarta. Tahun 2019, indeks Gini Jawa Tengah sebesar 0,361, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 0,357.

Tabel 4.5
Indeks Gini Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Surakarta	0,340	0,330	0,370	0,350	0,360	0,360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	Provinsi Jawa Tengah	0.341	0.357	0.383	0.390	0.388	0.382	0,357	0,365	0,357	0,361	0,359
3	Indonesia	0.378	0.388	0.413	0.406	0.414	0.402	0.394	0.391	0.384	0.382	0,385
4	Rata-rata Jawa Tengah	0,264	0,325	0,338	0,332	0,331	0,331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	0,304	0,331	0,350	0,340	0,338	0,338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah

4.1.5. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan dan bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja menjadi 288.959 atau naik sebesar 0,74% dan jumlah pengangguran naik sangat tajam menjadi 22.877 atau naik 90,59% sebagai dampak dari Pandemi Covid. Tahun 2021 jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta adalah 282.178 dengan jumlah pengangguran sebanyak 22.153. Pada tahun 2021, jumlah pengangguran mengalami penurunan meskipun belum signifikan.

Tingkat kesempatan kerja, yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama 2012-2021 menunjukkan tren peningkatan namun di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 92,08% dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 92.15%. Penurunan kesempatan kerja ini juga terjadi pada periode 2012-2013 yang berarti tingkat pengangguran mengalami kenaikan.

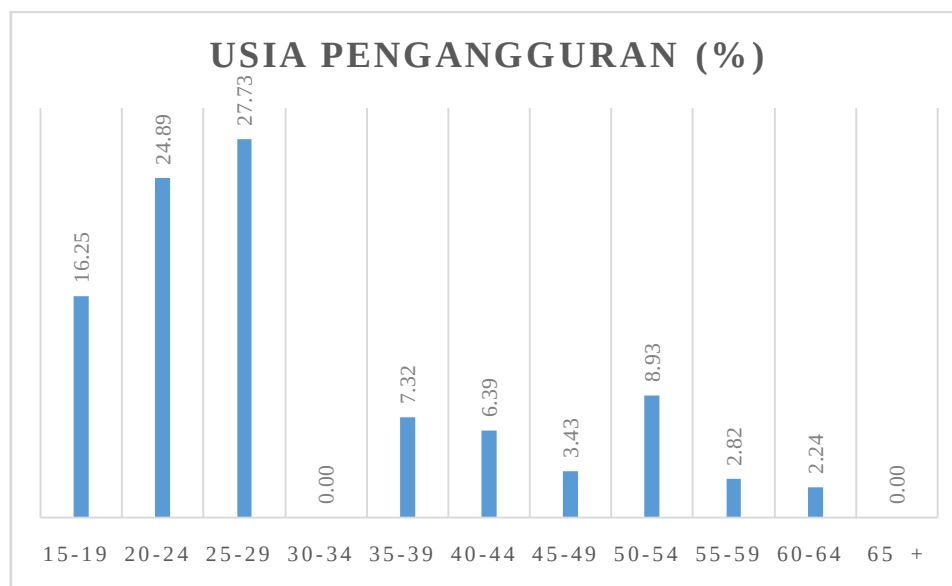
Tabel 4.6
Indikator Ketenagakerjaan Kota Surakarta Tahun 2010-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja (orang)	278.535	287.511	275.191	284.076	n.a.	271.527	271.375	286.811	288.959	282.178
Jumlah Pengangguran	17.513	20.763	16.957	12.877	n.a.	12.133	11.910	12.003	22.877	22.153

(orang)										
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	93,71	92,78	93,84	95,47	n.a.	95,53	95,61	95,82	92,08	92,15
Tingkat Pengangguran (%)	6,29	7,22	6,16	4,53	7,55	4,47	4,39	4,18	7,92	7,8
TPAK	70,43	72,10	68,48	70,12	n.a.	66,10	65,62	68,93	68,84	66,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Berdasarkan data tahun 2018 tersebut, dari sisi usia sebagian besar pengangguran Kota Surakarta berusia 25-29 tahun (27,73%), 20-24 tahun (24,89%), serta usia 15-19 tahun (16,25%). Dengan demikian secara keseluruhan pengangguran di Kota Surakarta yang berusia 15-29 tahun mencapai 68,87%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian tersendiri, terlebih melihat semakin besarnya pertumbuhan angkatan kerja di Kota Surakarta.

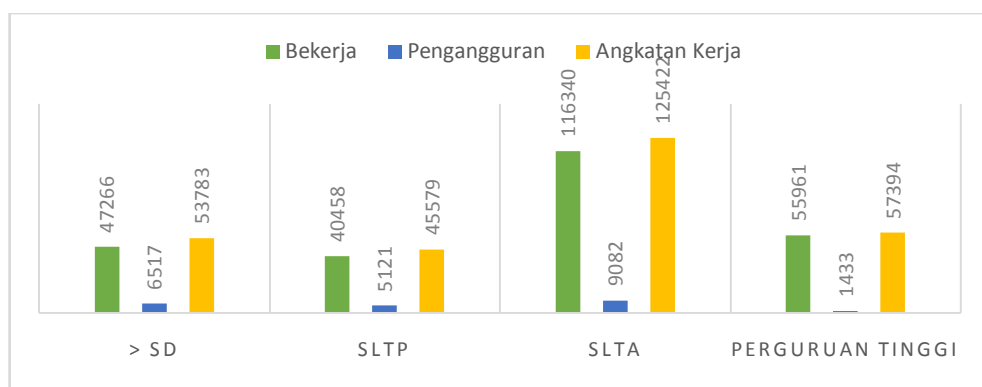


Sumber: Pusdatin Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019.

Gambar 4.6

Usia Pengangguran Kota Surakarta Tahun 2018

Berdasarkan kondisi tahun 2021, pengangguran yang terjadi di Kota Surakarta didominasi oleh mereka yang berijazah SMA dan SMK dengan jumlah 9.082. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa cukup banyaknya lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, serta banyaknya lulusan SMK yang tidak terserap ke dunia kerja meski pendidikan SMK disiapkan untuk siap kerja. Di sisi lain, pengangguran lulusan perguruan tinggi juga tergolong cukup besar. Lulusan perguruan tinggi yang menganggur mencapai 1.433.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 4.7

Pendidikan Tertinggi Pengangguran Kota Surakarta Tahun 2018

Berdasarkan data di tahun 2020, tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan SLTP yang mencapai 8,65%. Sedangkan pada tahun 2021 tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2021 adalah lulusan SD mencapai 12,1%. Bila dihitung kenaikan tingkat pengangguran selama 2020-2021, kenaikan tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan SD dari 6,73% di tahun 2020 menjadi 12,1% di tahun 2021 sedangkan lulusan SLTA dan perguruan tinggi mengalami penurunan dari 8,49% menjadi 7,2% serta 7,14% menjadi 2,4%.

Tabel 4.7

Pengangguran Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2020

Pendidikan Tertinggi	Pengangguran Terbuka		Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran (%)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
≤ SD	3.590	6.517	53.330	53.783	6,73	12,1
SLTP	4.307	5.121	49.788	45.579	8,65	11,2
SLTA	10.751	9.082	126.577	125.422	8,49	7,2
Perguruan Tinggi	4.229	1.433	59.264	57.394	7,14	2,4
Jumlah	22.877	22.153	288.959	282.178	7,92	7,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2022.

Berdasarkan tabel 4.8 dapat terlihat bahwa kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB sangat besar (27%), namun serapan tenaga kerja rendah (3,63%). Sedangkan kontribusi sektor transportasi dalam PDRB relative kecil (2,7%) namun serapan tenaga kerja cukup besar (6,99%), lebih besar dari sector konstruksi.

Tabel 4.8
PDRB dan Serapan Tenaga Kerja

Lapangan Usaha	Persen
1. Pertanian	0,77
2. Pertambangan	0,18
3. Industri	22,15
4. Listrik dan Gas	0,73
5. Konstruksi	3,63
6. Perdagangan	40,42
7. Angkutan	6,99
8. Keuangan	5,84
9. Jasa	19,30
JUMLAH	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengangguran akan mendorong timbulnya permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang ditempuh harus diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan tingkat pengangguran, namun bila kenaikan jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah pengangguran, maka tingkat pengangguran akan turun.

Bagaimanakah hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi? Studi yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dengan pengurangan tingkat pengangguran, sehingga pengurangan tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Korelasi antara PDRB dengan jumlah pengangguran di Surakarta adalah erat yang ditunjukkan dengan nilai r^2 adjusted sebesar 0,83 dengan koefisien regresi sebesar -0,00042. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PDRB diikuti akan semakin mengurangi jumlah pengangguran. Meski demikian, kecilnya koefisien regresi menunjukkan bahwa diperlukan

kenaikan PDRB yang sangat besar untuk mengurangi jumlah pengangguran. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi mengurangi jumlah pengangguran harus dilakukan dengan kebijakan dan strategi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui kebijakan alokasi APBD untuk program pemberdayaan masyarakat melalui dinas terkait.

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,914771
R Square	0,836807
Adjusted R Square	0,813493
Standard Error	1832,005
Observations	9

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	30256,43	2402,37	12,59441	4,59E-06
PDRB-ADHB	-0,00042	6,94E-05	-5,99115	0,000547

Pengangguran akan mendorong munculnya kemiskinan akibat tidak adanya dana untuk keperluan sehari-hari. Secara teoritis, keduanya akan memiliki hubungan positif dalam arti, semakin tinggi jumlah pengangguran akan mendorong semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin. Nilai adjusted r² sebesar 0,78 dengan koefisien yang tergolong kecil yaitu 0,001617.

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,884287
R Square	0,781964
Adjusted R Square	0,750816
Standard Error	3,872371
Observations	9

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	30,51418	5,428057	5,621566	0,000798
Jumlah Pengangguran	0,001617	0,000323	5,010467	0,001547

4.1.6. ICOR dan PDRB

ICOR merupakan indikator yang menunjukkan perubahan output (PDRB) akibat perubahan investasi. Dengan kata lain, ICOR merupakan salah satu indikator efisiensi ekonomi. Semakin kecil nilai ICOR semakin tinggi tingkat efisiensi perekonomian.

Penghitungan ICOR ada yang menggunakan time lag 0,1, atau 2. Bila menggunakan time lag 0, artinya investasi tahun ini langsung berdampak pada output tahun ini juga. Bila menggunakan time lag 1 misalnya, berarti output tahun ini dihasilkan dari investasi 1 tahun yang lalu. Penggunaan time lag sangat berkaitan dengan karakteristik investasi. Investasi yang sifatnya jangka panjang dengan skala besar, lebih tepat menggunakan ICOR dengan time lag 1 atau 2.

Penghitungan ICOR menggunakan PDRB Berdasarkan Pengeluaran, dan data yang tersedia adalah data hingga tahun 2019. Berdasarkan data yang tersedia dan dilakukan perhitungan ICOR lag 1 menggunakan PDRB ADHB, terlihat ICOR Kota Surakarta sangat tinggi, namun ketika menggunakan lag 2, nilai ICOR menjadi turun sangat drastis. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa karakteristik investasi di Kota Surakarta lebih dominan investasi yang sifatnya jangka panjang. ICOR lag 2 tahun 2019 sebesar 3,48 terlihat lebih kecil dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 4,68. Di Kota Surakarta investasi pada tahun t baru berpengaruh terhadap perekonomian mulai tahun $t+2$.

Tabel 4.9
ICOR Kota Surakarta Tahun 2011-2019

LAG 1

ICOR-PMTB	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Surakarta	6,51	6,97	7,27	7,26	8,05	8,93	8,36	9,21	9,47
Jawa Tengah	2,86	3,67	3,21	2,97	3,49	4,38	4,29	4,33	4,79
Indonesia	2,53	3,60	3,37	3,29	3,95	4,62	3,68	3,84	5,14
ICOR-PMTB & PERUB.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Surakarta	6,91	7,69	7,73	7,54	8,12	8,98	8,40	9,30	9,56
Jawa Tengah	3,34	4,54	3,75	3,26	3,65	4,47	4,42	4,51	4,91
Indonesia	2,67	3,85	3,57	3,50	4,10	4,80	3,86	4,11	5,37

LAG 2

ICOR-PMTB	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Surakarta	3,54	3,73	3,84	3,97	4,38	4,50	4,68	3,48
Jawa Tengah	1,73	1,76	1,63	1,71	2,03	2,27	2,28	2,37
Indonesia	1,61	1,81	1,76	1,89	2,21	2,12	1,97	2,28
ICOR-PMTB & PERUB. INVENTORI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Surakarta	3,90	3,97	3,99	4,01	4,41	4,53	4,73	3,52
Jawa Tengah	2,14	2,06	1,80	1,78	2,07	2,33	2,38	2,43
Indonesia	1,73	1,92	1,87	1,96	2,29	2,22	2,10	2,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Komponen investasi untuk penghitungan ICOR juga lazim memasukan komponen perubahan inventori. Dengan memasukkan komponen perubahan inventori, nilai ICOR akan lebih tinggi. Bila diperbandingkan dengan ICOR Jawa Tengah dan Nasional, nilai ICOR Kota Surakarta terlihat lebih tinggi. Meski demikian, nilai ICOR 2018-2019 Kota Surakarta menunjukkan penurunan sementara Jawa Tengah dan nasional menunjukkan kenaikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Gambar 4.8

Pendidikan Tertinggi Pengangguran Kota Surakarta Tahun 2018

4.1.7. LQ dan Shift-Share

Analisis LQ merupakan analisis untuk melihat keunggulan suatu sektor atau subsektor secara relatif dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, seperti Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada dasarnya analisis ini untuk melihat posisi suatu sektor atau subsektor tertentu diantara sektor atau subsektor yang sama di seluruh wilayah. Implikasi lain adalah untuk melihat kemampuan suatu sektor atau subsektor untuk memenuhi kebutuhan internal wilayah. Analisis LQ dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu Static LQ (SLQ) serta Dynamic LQ (DLQ). Dinamic LQ menggunakan dasar pertumbuhan sektoral.

Jika LQ lebih besar dari 1, sektor tersebut merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi Kota Surakarta lebih tinggi dari tingkat provinsi, Jika LQ lebih kecil dari 1, merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat provinsi, Jika LQ sama dengan 1, berarti tingkat spesialisasi Kota Surakarta sama dengan tingkat provinsi. Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai berikut: jika $DLQ > 1$, maka potensi perkembangan sektor i di Kota Surakarta lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di provinsi. Namun, jika $DLQ < 1$, maka potensi perkembangan sektor i di Kota Surakarta lebih rendah dibandingkan provinsi secara keseluruhan. Gabungan antara nilai

SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam menentukan apakah sektor ekonomi tersebut tergolong unggulan, prospektif, andalan, dan tertinggal.

Kriteria	DLQ > 1	DLQ < 1
SLQ > 1	Unggulan	Prospektif
SLQ < 1	Andalan	Tertinggal

Berdasarkan nilai LQ, pada tahun 2020 terdapat cukup banyak sektor yang memiliki LQ di bawah 1, yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor transportasi dan pergudangan; serta sektor jasa lainnya. Kecilnya nilai LQ tersebut mengindikasikan bahwa usaha-usaha di sektor-sektor tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan internal Kota Surakarta, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain. Selain itu, nilai LQ < 1 atas beberapa sektor tersebut juga mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut bukan sektor yang masuk dalam kelompok terspesialisasi di Surakarta. Meski mungkin di Kota Surakarta sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi penting, namun di tingkat provinsi sektor-sektor tersebut tergolong kecil.

Dari sisi Dynamic LQ (DLQ), pada tahun 2020 terdapat cukup banyak sektor yang memiliki nilai DLQ di bawah satu dan hanya ada 3 sektor yang memiliki nilai DLQ di atas yaitu sektor pengelolaan sampah, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor kesehatan dan kegiatan sosial. Dengan demikian, meski ketiga sektor tersebut dalam konteks provinsi tidak menonjol, namun perubahan atau pertumbuhan sektor tersebut selama 2019-2021 termasuk sangat menonjol dalam level provinsi. Bila dikaitkan dengan proporsinya nilai LQ sektor industri pengolahan yang di bawah satu mengindikasikan bahwa dalam pembentukan PDRB Surakarta tergolong besar sehingga sangat mendorong perekonomian Surakarta, namun sebenarnya sektor ini di Surakarta bila dibandingkan dengan kondisi di provinsi Jawa Tengah masih sangat kurang.

Nilai DLQ pada tahun 2021 pada Sebagian besar sektor ekonomi terlihat menunjukkan angka yang cukup besar dibandingkan 2020. Sektor pengadaan listrik dan gas memiliki nilai LQ yang tinggi yaitu masing-masing 2,034 dan 1,002. Nilai LQ sektor penyediaan akomodasi pada tahun 2021 adalah 1,351. Kota Surakarta memiliki fasilitas akomodasi yang sangat memadai dengan tingkat hunian yang tinggi. Kondisi ini ditunjang dengan destinasi wisata mengingat Surakarta juga merupakan kota budaya.

Nilai LQ tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi yang pada tahun 2021 mencapai 3,047. Dari perhitungan nilai LQ disimpulkan bahwa perekonomian Surakarta

memiliki keunggulan di hampir semua sektor, kecuali sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa lainnya.

Table 4.10
Nilai LQ dan Dynamic LQ Kota Surakarta 2019-2020

LAPANGAN USAHA	2017		2018		2019		2020		2021	
	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,033	1,015	0,033	1,009	0,033	1,012	0,033	0,986	0,033	1,007
B. Pertambangan dan Penggalian	0,001	0,944	0,000	0,368	0,000	0,890	0,000	0,937	0,000	0,811
C. Industri Pengolahan	0,224	0,996	0,223	0,996	0,224	1,004	0,221	0,989	0,228	1,030
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,083	0,987	2,067	0,992	2,053	0,994	2,031	0,989	2,034	1,002
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,416	0,994	2,401	0,993	2,400	1,000	2,400	1,000	2,156	0,898
F. Konstruksi	2,516	0,978	2,480	0,986	2,462	0,993	2,485	1,009	2,316	0,932
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,624	0,994	1,604	0,988	1,586	0,989	1,549	0,977	1,538	0,993
H. Transportasi dan Pergudangan	0,858	0,990	0,840	0,979	0,828	0,985	0,454	0,549	0,452	0,995
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,598	0,977	1,532	0,959	1,472	0,961	1,329	0,902	1,351	1,017
J. Informasi dan Komunikasi	3,044	0,972	3,023	0,993	2,971	0,983	3,047	1,026	3,074	1,009
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,248	0,994	1,240	0,994	1,246	1,005	1,234	0,991	1,234	1,000
L. Real Estat	2,340	0,983	2,263	0,967	2,199	0,972	2,195	0,998	2,207	1,006
M,N. Jasa Perusahaan	2,010	0,957	1,994	0,992	1,968	0,987	1,922	0,977	1,893	0,985
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,036	0,983	2,016	0,990	2,012	0,998	1,978	0,983	1,974	0,998
P. Jasa Pendidikan	1,117	0,975	1,092	0,978	1,072	0,981	1,054	0,984	1,048	0,994
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,230	0,984	1,225	0,996	1,214	0,991	1,246	1,027	1,251	1,004
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,601	0,978	0,585	0,975	0,575	0,982	0,530	0,923	0,524	0,989

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Tabel 4.11
Overlay LQ dan DLQ Sektor Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2021

Kriteria	DLQ > 1 Unggulan	DLQ < 1 Prospektif
LQ > 1	Sektor : 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 3. Informasi dan Komunikasi 4. Jasa Keuangan dan Asuransi 5. Real Estat 6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor : 1. Konstruksi 2. Jasa Pendidikan 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4. Perdagangan Besar dan Eceran 5. Jasa Perusahaan 6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
LQ < 1	Andalan Sektor : 1. Industri Pengolahan 2. Pertanian	Tertinggal Sektor : 1. Pertambangan dan Penggalian

		2. Transportasi dan Pergudangan 3. Jasa Lainnya
--	--	--

Dari tinjauan shift-share, perhitungan shift share dilakukan pada periode 2019-2021 yang difokuskan pada regional dan national share. Regional share dimaksudkan untuk mengetahui dampak perekonomian provinsi terhadap Kota Surakarta sedangkan national share untuk mengetahui dampak perekonomian nasional terhadap Kota Surakarta.

Berdasarkan hal tersebut pada periode 2019-2021 terlihat nilai regional dan national memiliki total nilai dengan selisih yang cukup tinggi. Hal ini berarti peran provinsi dan nasional terhadap perekonomian Kota Surakarta belum seimbang. Sektor di tingkat provinsi dan nasional yang berperan penting terhadap PDRB Kota Surakarta adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan, serta sektor akomodasi, serta informasi dan komunikasi.

Dengan demikian pengaruh perekonomian provinsi dan nasional dalam pembentukan PDRB Kota Surakarta cukup besar. Besarnya pengaruh provinsi dan nasional terhadap perekonomian Kota Surakarta juga menggambarkan tingginya derajat keterbukaan perekonomian Kota Surakarta.

Tabel 4.12

Nilai Regional/National Share Kota Surakarta Tahun 2019-2021

LAPANGAN USAHA	Nij	Mij	Cij	D
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15816,31	-5816,17	5701,61241	15701,75
Pertambangan dan Penggalian	61,50157	-10,1476	-433,73398	-382,38
Industri Pengolahan	283950,3	-90419,6	113818,822	307349,5
Pengadaan Listrik dan Gas	8355,972	5966,236	28,352555	14350,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6236,382	3726,643	-5510,2957	4452,73
Konstruksi	958740,2	284519,8	-545872,34	697387,6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	861327,1	185116,1	-252196,18	794247,1
Transportasi dan Pergudangan	105321,5	-273457	-341188,85	-509325
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	186079,3	54365,64	-247202,41	-6757,43
Informasi dan Komunikasi	506244,1	1846534	230160,638	2582939
Jasa Keuangan dan Asuransi	126853,4	-2742,33	15505,6113	139616,7
Real Estate	162030,5	26806,24	-53544,815	135291,9
Jasa Perusahaan	27225,91	9831,818	-9675,3298	27382,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	194921,4	-106563	-12193,987	76164,05
Jasa Pendidikan	154550,8	55378,86	-60477,852	149451,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38029,42	46833,14	17157,7479	102020,3
Jasa lainnya	35934,59	-3847,69	-36209,623	-4122,72
PDRB	3671679	2036222	-1182132,6	4525768

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Perhitungan shift-share dinamis memberikan gambaran apakah suatu sektor atau subsektor terspesialisasi atau tidak, serta apakah suatu sektor atau subsektor memiliki daya saing atau tidak bila dibandingkan dengan sektor atau subsektor yang sama di Jawa Tengah. Nilai efek spesialisasi yang negatif menggambarkan bahwa sektor atau subsektor tersebut bukan merupakan sektor yang terspesialisasi di Surakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut belum menjadi sektor yang *“leading”* dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Demikian pula dengan nilai efek kompetitif yang negatif memberikan gambaran bahwa sektor tersebut memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan sektor sejenis di Jawa Tengah. Dengan demikian, ada kemungkinan suatu sektor merupakan sektor yang terspesialisasi di Surakarta, namun daya saingnya rendah (nilai positif kecil) atau bahkan tidak memiliki daya saing (nilai negatif). Sebaliknya, ada kemungkinan suatu sektor bukan merupakan sektor yang terspesialisasi di Surakarta, namun memiliki daya saing bila dibandingkan dengan sektor sejenis di wilayah Jawa Tengah. Sektor yang unggul merupakan sektor yang memiliki efek spesialisasi dan efek kompetitif yang keduanya positif.

Sektor industri pengolahan misalnya, pada tahun 2019 merupakan sektor yang memiliki daya saing di tingkat provinsi, namun dalam konteks provinsi tersebut, sektor ini bukan merupakan sektor yang menjadi spesialisasi di Kota Surakarta. Meski demikian pada tahun 2020 sektor industri pengolahan memiliki nilai negatif baik pada efek spesialisasi maupun efek kompetitif. Untuk sektor konstruksi misalnya, pada tahun 2019 sektor tersebut menjadi sektor spesialisasi di Kota Surakarta, namun dalam konteks provinsi sektor tersebut tidak kompetitif dan di tahun 2020 sektor konstruksi memiliki nilai positif baik pada efek spesialisasi maupun kompetitif, meskipun belum tentu hal ini menunjukkan peningkatan kinerja tapi juga bisa disebabkan karena sektor konstruksi di Jawa Tengah mengalami kontraksi yang lebih parah dibandingkan Kota Surakarta.

Secara umum kondisi Kota Surakarta berdasarkan efek spesialisasi dan kompetitif tidak buruk karena cukup banyak sektor ekonomi yang memiliki angka positif pada kedua efek tersebut. Beberapa sektor dengan tanda blok memiliki angka positif pada kedua efek.

4.1.8. Analisis Rasio PDRB

Informasi rasio ekspor terhadap PDRB dapat menggambarkan peran ekspor dalam pembentukan PDRB menggunakan pendekatan pengeluaran. Semakin tinggi proporsi ekspor terhadap PDRB, semakin baik pula struktur PDRB. Rasio ekspor terhadap pdrb (pdp) mengukur dampak ekspor terhadap PDRB (PDB) serta mengukur ketergantungan wilayah

lain terhadap Surakarta. Data ekspor pada struktur PDRB berdasarkan pengeluaran di Kota Surakarta hanya tersedia hingga tahun 2019.

Rasio ekspor terhadap PDRB kota Surakarta pada tahun 2010 adalah 30% dan selama 2010-2019 menunjukkan tren peningkatan rasio. Rasio serupa untuk provinsi Jawa Tengah memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan Kota Surakarta namun untuk nasional nilai rasio tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan Kota Surakarta. Rasio ekspor terhadap PDRB Kota Surakarta pada tahun 2012 (36%) sempat lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Tengah (35%) namun mulai tahun 2013, rasio ekspor terhadap PDRB Kota Surakarta selalu lebih kecil dibandingkan provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.13

Perbandingan Rasio Ekspor Terhadap PDRB Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional

WILAYAH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Surakarta	0,30	0,34	0,36	0,35	0,36	0,34	0,33	0,35	0,37	0,38
Jawa Tengah	0,34	0,35	0,35	0,38	0,40	0,38	0,38	0,40	0,42	0,42
Indonesia	0,24	0,26	0,25	0,24	0,24	0,21	0,19	0,20	0,21	0,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Ekspor Barang dan Jasa merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor pasti menggunakan kapital (PMTB), sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor barang dan jasa terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor barang dan jasa dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

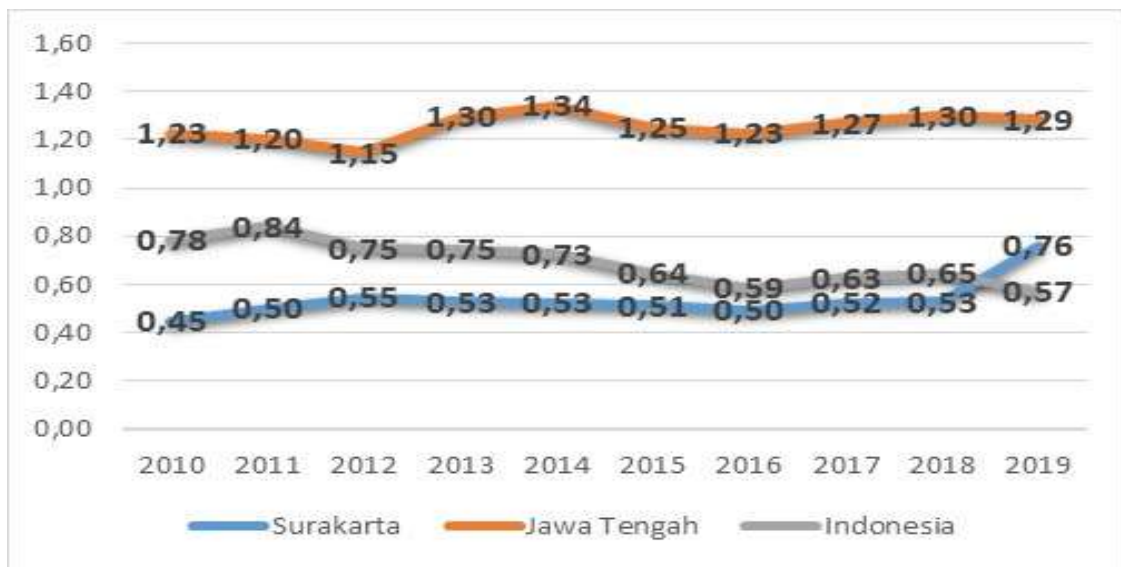
Nilai rasio ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta selama 2010-2019 berkisar antara 0,45 s.d. 0,76 sementara untuk provinsi Jawa Tengah di atas 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk domestik yang dihasilkan di Kota Surakarta masih lebih sedikit yang digunakan untuk ekspor dibandingkan untuk kegiatan investasi domestik. Hal ini berbeda dengan provinsi Jawa Tengah, produk domestic lebih banyak digunakan untuk ekspor dibandingkan untuk kegiatan investasi domestic.

Tabel 4.14

Perbandingan Rasio Ekspor Terhadap PMTB Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Surakarta	0,45	0,50	0,55	0,53	0,53	0,51	0,50	0,52	0,53	0,76
Jawa Tengah	1,23	1,20	1,15	1,30	1,34	1,25	1,23	1,27	1,30	1,29
Indonesia	0,78	0,84	0,75	0,75	0,73	0,64	0,59	0,63	0,65	0,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

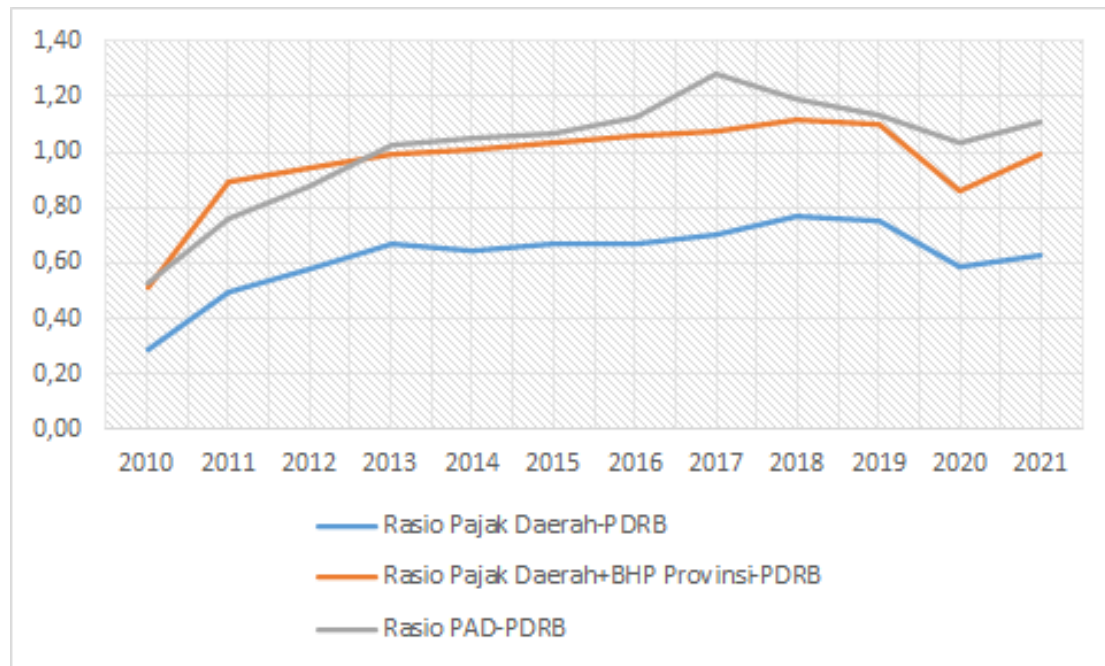


Gambar 4.9

Perbandingan Rasio Ekspor Terhadap PMTB Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional

Rasio PDRB yang juga penting untuk diperhatikan adalah tax ratio, yaitu rasio pajak daerah terhadap PDRB. Dalam tax ratio, pajak daerah yang digunakan bisa berupa pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD, namun bisa juga pajak daerah yang merupakan bagi hasil dengan provinsi. Nilai tax ratio Kota Surakarta apabila menggunakan komponen pajak daerah saja terlihat sangat kecil yaitu di bawah 1% sementara apabila menggunakan pajak daerah dan bagi hasil pajak provinsi, nilainya lebih tinggi, bahkan tahun 2013-2019 di atas 1%. Menurut Kementerian Keuangan, rata-rata tax ratio daerah di Indonesia berkisar 1,2% sehingga nilai Kota Surakarta tersebut tidak berbeda dengan rata-rata nasional.

Di sisi lain, kecilnya tax ratio menggambarkan nilai pajak yang diperoleh tidak sebesar PDRB. Hal ini berarti aktivitas ekonomi masyarakat belum membawa dampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Di tahun 2020 rasio ini menunjukkan penurunan yang cukup tajam sebagai akibat dampak Pandemi Covid yang menyebabkan turunnya pajak maupun PDRB.

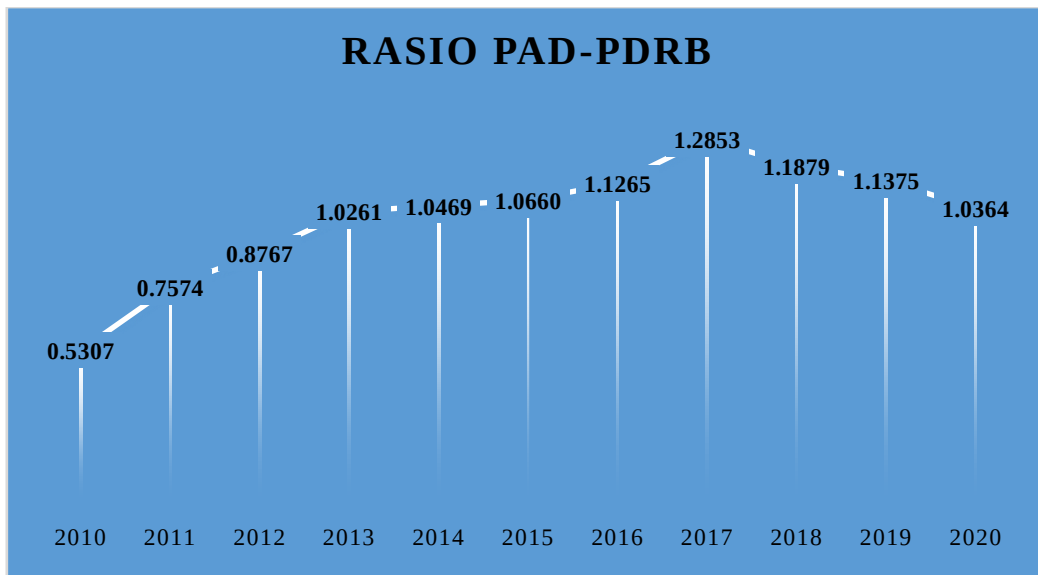


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Gambar 4.10

Tax Ratio Kota Surakarta Tahun 2010-2020

Rasio antara PAD dengan PDRB Kota Surakarta selama 2010-2021 menunjukkan tren positif, meski khusus pada periode 2020 terjadi tren penurunan. Rasio ini menggambarkan sejauh mana kenaikan PDRB atau pertumbuhan ekonomi membawa dampak pada peningkatan PAD. Idealnya, kenaikan PDRB akan berdampak pada peningkatan PAD karena kenaikan PDRB menggambarkan kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga akan membawa dampak pada kenaikan komponen-komponen PAD. Namun, struktur PDRB memang berpengaruh terhadap rasio ini. Kenaikan PDRB yang disebabkan karena kenaikan sektor yang lebih banyak focus pada pelayanan public sangat mungkin tidak akan mendorong peningkatan PAD. Oleh karena itu, untuk memperbesar rasio ini (dan juga tax ratio), kebijakan dan strategi yang mendorong peningkatan output sektor industri, perdagangan, dan sejenisnya perlu dirumuskan secara lebih komprehensif.



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Gambar 4.11

Rasio PAD Terhadap PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2020

4.1.9. Analisis Makro Keuangan Daerah

4.1.9.1. APBD Kota Surakarta

Selama periode 2018-2019, pendapatan Kota Surakarta meningkat sebesar 3,5% dari Rp,879 trilyun menjadi Rp1.945 trilyun. Kenaikan pendapatan tersebut merupakan kontribusi dari kenaikan PAD sebesar 3,46%, kenaikan dana perimbangan sebesar 1,78%, serta kenaikan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 11,21%.

Di tahun 2020, pendapatan Kota Surakarta turun -5,9% menjadi Rp1,831 trilyun. Komponen PAD mengalami penurunan sebesar -9,56% dari Rp546 milyar menjadi Rp493,7 milyar. Komponen dana perimbangan juga mengalami penurunan sebesar -6,1% dari Rp1,110 trilyun menjadi Rp1,042 trilyun. Penurunan tersebut sebagai dampak Pandemi Covid, khususnya penurunan pada penerimaan pajak daerah yang cukup tajam serta penurunan pada penerimaan dana perimbangan akibat tekanan APBN.

Dari sisi belanja daerah, total belanja daerah juga menunjukkan kenaikan sebesar 5,09% selama 2018-2019. Pada periode 2019-2020 total belanja daerah mengalami penurunan sebesar -19,62%. Selama 2019-2020 komponen belanja tak terduga menunjukkan kenaikan yang sangat tinggi yaitu dari Rp247 juta menjadi Rp37,8 milyar. Peningkatan yang ekstrim terjadi akibat Pandemi Covid yang membuat pemerintah daerah harus melakukan banyak realokasi anggaran.

Pada aspek proporsinya, selama 2018-2020 proporsi PAD dalam struktur pendapatan menunjukkan pola penurunan. Hal yang sama juga terjadi pada proporsi komponen dana perimbangan yang menunjukkan penurunan sepanjang 2018-2020. Proporsi dana perimbangan ini masih mendominasi APBD Kota Surakarta dengan kisaran angka 56% s.d, 58% sedangkan PAD memiliki proporsi sekitar 27% s.d. 28%. Dari sisi belanja, proporsi belanja pegawai tahun 2020 sebesar 43%. Proporsi ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 namun secara nominal lebih kecil. Proporsi belanja barang dan jasa tahun 2020 secara nominal lebih rendah dibandingkan tahun 2019, namun secara proporsi belanja barang dan jasa 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019.

Tabel 4.15
Perkembangan Realisasi APBD Kota Surakarta Tahun 2018-2020

Komponen	2018		2019		2020	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Pendapatan Daerah	1.879.056.016.679	100,00	1.945.953.241.924	100,00	1.831.036.802.038	100,00
Pendapatan Asli Daerah	527.739.388.159	28,09	546.020.008.117	28,06	493.789.099.721	26,97
Hasil Pajak Daerah	339.919.952.411	18,09	360.053.930.720	18,50	279.209.949.240	15,25
Hasil Retribusi Daerah	57.024.070.534	3,03	55.288.238.663	2,84	46.497.064.676	2,54
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.258.541.140	0,65	13.346.410.931	0,69	12.497.651.358	0,68
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.536.824.074	6,31	117.331.427.803	6,03	155.584.434.447	8,50
Dana Perimbangan	1.090.922.293.666	58,06	1.110.329.047.182	57,06	1.042.669.996.172	56,94
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	47.513.325.057	2,53	32.359.858.700	1,66	58.691.410.809	3,21
Dana Alokasi Umum	826.587.795.000	43,99	879.123.635.000	45,18	794.665.771.000	43,40
Dana Alokasi Khusus	216.821.173.609	11,54	198.845.553.482	10,22	189.312.814.363	10,34
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	260.394.334.854	13,86	289.604.186.625	14,88	294.577.706.145	16,09
Pendapatan Hibah	47.510.847.623	2,53	47.025.680.000	2,42	69.881.492.750	3,82
Dana Darurat	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	155.505.351.958	8,28	166.656.921.625	8,56	132.073.766.816	7,21
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.250.000.000	1,77	46.763.298.000	2,40	61.860.673.000	3,38
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	24.128.135.273	1,28	29.158.287.000	1,50	30.761.773.579	1,68
Pendapatan Lain-Lain	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komponen	2018	2019	2020			

	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Belanja Daerah	1.914.818.594.396	100,00	2.012.408.112.863	100,00	1.617.519.330.005	100,00
Belanja Tindak Langsung	770.074.438.597	40,22	809.742.263.820	40,24	799.336.357.813	49,42
Belanja Pegawai	682.313.809.438	35,63	727.147.069.163	36,13	701.896.797.525	43,39
Belanja Bunga	232.995.893	0,01	129.347.507	0,01	25.848.104	0,00
Belanja Subsidi	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	64.500.976.050	3,37	63.341.922.362	3,15	44.481.552.386	2,75
Belanja Bantuan Sosial	20.146.134.092	1,05	18.082.476.647	0,90	14.050.979.500	0,87
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	171.000.000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	859.901.120	0,04	794.123.477	0,04	999.500.000	0,06
Belanja Tidak Terduga	1.849.622.004	0,10	247.324.664	0,01	37.881.680.298	2,34
Belanja Langsung	1.144.744.155.799	59,78	1.202.665.849.043	59,76	818.182.972.192	50,58
Belanja Pegawai	-	0,00	6.125.878.835	0,30	2.333.853.000	0,14
Belanja Barang dan Jasa	620.973.837.646	32,43	652.961.793.288	32,45	564.885.864.005	34,92
Belanja Modal	523.770.318.153	27,35	543.578.176.920	27,01	250.963.255.187	15,52

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah.

Dari sisi rasio APBD, selama 2015-2017 rasio kemandirian Kota Surakarta menunjukkan peningkatan namun di periode 2017-2020 menunjukkan tren penurunan. Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan besarnya ketergantungan terhadap transfer dari provinsi dan pusat, seperti dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, bantuan, dan sebagainya. Meskipun rasio ini meningkat namun nilai rasio masih di bawah 50% sehingga ketergantungan APBD Kota Surakarta terhadap transfer dari pusat dan provinsi relative masih besar.

Rasio derajat desentralisasi fiskal terlihat juga kecil karena rasio ini juga dipengaruhi oleh rasio kemandirian. Derajat desentralisasi fiskal merupakan rasio antara PAD dengan penerimaan daerah. Rasio ini memiliki pola yang sama dengan rasio kemandirian, yaitu terjadi tren peningkatan selama 2015-2017 dan selanjutnya mengalami tren penurunan selama periode 2017-2020. Sementara itu rasio belanja modal juga menunjukkan kenaikan secara konsisten selama 2015-2018, namun mulai 2018-2020 terjadi tren penurunan. Rasio ini merupakan rasio antara belanja modal terhadap total belanja. Semakin besar belanja modal, diharapkan belanja untuk barang public semakin meningkat.

Tabel 4.16**Rasio APBD Kota Surakarta Tahun 2015-2020**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Kemandirian (%)	32,11	33,83	41,42	40,48	40,36	31,96
Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	23,77	24,99	29,24	28,09	28,06	23,05
Rasio Belanja Modal (%)	15,39	18,30	26,56	27,35	27,01	15,51

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah.

Tabel 4.17**Perbandingan Rasio APBD Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2019**

Indikator	Tahun	Kota Magelang	Kota Pekalongan	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Surakarta	Kota Tegal
Rasio Kemandirian (%)	2015	31,39	24,23	28,62	58,38	32,11	42,11
	2018	39,08	25,52	31,49	79,14	40,48	40,14
	2019	36,90	14,86	35,06	68,59	34,52	40,85
Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	2015	23,89	18,78	22,25	35,90	23,77	28,67
	2018	27,52	19,80	23,48	43,01	28,09	27,86
	2019	26,36	12,94	25,96	40,68	25,19	28,10
Rasio Belanja Modal (%)	2015	19,19	19,89	15,90	22,69	15,39	21,63
	2018	25,33	16,57	24,04	27,26	27,35	12,39
	2019	13,22	5,57	6,11	14,59	15,82	1,86
Tax Ratio (%)	2015	0,97	1,31	0,91	0,93	1,04	0,89
	2018	0,99	1,45	0,97	1,05	1,12	1,06
	2019	0,42	0,59	0,37	0,23	0,44	0,46

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

4.1.9.2. Kinerja Kredit Sektoral

Dari sisi keuangan daerah lain yaitu kredit sektoral PDRB, kredit perbankan selama 2018-2020 yang terbesar adalah kredit pada sektor industri pengolahan yang berkisar antara 37% hingga 38% dan yang terkecil adalah sektor listrik, gas, dan air dan sektor administrasi pemerintahan. Dalam struktur PDRB Kota Surakarta, sektor kontribusi memegang peranan terbesar yaitu 27% namun memiliki kredit sektoral yang relative kecil yaitu di kisaran 4% dari total kredit yang disalurkan. Sektor industri pengolahan dalam struktur PDRB memiliki kontribusi 8% namun justru memiliki proporsi kredit terbesar. Sektor perdagangan yang memiliki proporsi sekitar 21% s.d 22% memiliki proporsi kredit sekitar 21%

Tabel 4.18

Alokasi Kredit Perbankan Pada Sektor Ekonomi Tahun 2018-2020

SEKTOR/LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan, Perikanan	1.348.622.178.240	1.588.736.397.075	1.481.044.337.897
Pertambangan dan Penggalian	44.821.231.394	84.145.007.686	44.797.870.745
Industri Pengolahan	21.362.476.115.245	22.746.753.418.411	22.771.540.237.939
Listrik, gas dan air	66.806.014.500	32.927.546.984	22.653.567.019
Konstruksi	2.289.389.056.990	2.969.815.451.990	2.776.353.557.580
Perdagangan Besar dan Eceran	12.754.944.656.899	13.219.166.084.386	12.726.943.755.383
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	1.873.559.396.896	2.107.682.597.284	2.145.697.043.893
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2.708.893.695.075	2.878.885.207.636	2.727.170.443.642
Perantara Keuangan	497.530.292.477	384.194.068.946	305.811.420.245
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.163.460.455.174	1.249.006.514.854	1.290.655.794.223
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.197.782.751	9.825.940.392	9.778.204.815
Jasa Pendidikan	608.820.256.159	529.416.801.335	465.173.789.004
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	693.850.489.799	881.325.641.667	819.348.472.032
Lainnya	11.656.338.604.498	12.279.235.060.625	12.173.890.550.525
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	758.314.965.492	908.453.331.456	916.384.375.569
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	55.244.303.690	54.802.172.743	78.133.223.016
Kegiatan yang belum jelas batasannya	114.012.169.045	26.098.828.392	83.045.430.636
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	4.371.807.705.208	4.711.186.297.232	4.758.271.073.404
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	113.898.324.258	108.640.171.793	129.184.768.200
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	288.737.256.613	288.986.081.759	272.243.287.739
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	286.560.885.101	271.349.933.444	176.277.845.715
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk pinjaman multiguna)	3.857.576.019.684	4.067.388.057.987	3.907.794.126.405
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1.810.186.975.407	1.844.330.185.839	1.852.556.419.839
TOTAL	57.077.510.226.097	60.961.115.739.271	59.760.859.044.942

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Kota Surakarta, diolah.

Meskipun industri pengolahan memiliki alokasi kredit sektoral terbesar, namun sektor ini justru memiliki posisi kredit yang bermasalah (non performing loan atau NPL) yang juga terbesar. Pada tahun 2020, sebesar 82,30% kredit di sektor industri pengolahan memiliki status NPL. Posisi NPL kedua adalah sektor perdagangan dengan NPL sebesar 7,48% dan yang ketiga adalah sektor penyediaan akomodasi makan dan minum dengan NPL tahun 2020 sebesar 4,73%.

Tabel 4.19

Proporsi Non Performing Loan (NPL) Tahun 2020

Kredit Sektoral	Kredit	NPL	Persentase NPL
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	1.416.367.239.891	21.585.591.476	0,28
Perikanan	64.677.098.006	607.731.896	0,01
Pertambangan dan Penggalian	44.797.870.745	1.375.833.332	0,02
Industri Pengolahan	22.771.540.237.939	6.425.131.777.235	82,30
Listrik, gas dan air	22.653.567.019	0	0,00
Konstruksi	2.776.353.557.580	91.691.666.023	1,17
Perdagangan Besar dan Eceran	12.726.943.755.383	584.159.509.466	7,48
Penyediaan akomodasi dan penyediaan	2.727.170.443.642	368.929.196.960	4,73

makan minum			
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	2.145.697.043.893	1.878.454.644	0,02
Perantara Keuangan	305.811.420.245	3.493.684.178	0,04
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.290.655.794.223	8.748.883.929	0,11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.778.204.815	717.771.106	0,01
Jasa Pendidikan	465.173.789.004	3.110.665.619	0,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	819.348.472.032	3.061.277.509	0,04
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	916.384.375.569	71.039.843.537	0,91
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	78.133.223.016	1.772.436.668	0,02
Kegiatan yang belum jelas batasannya	83.045.430.638	2.062.194.770	0,03
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	4.758.271.073.404	89.996.493.689	1,15
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	129.184.768.200	65.951.999	0,00
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	272.243.287.739	41.605.098.170	0,53
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	176.277.845.715	3.814.965.238	0,05
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk pinjaman multiguna)	3.907.794.126.405	57.689.725.032	0,74
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1.852.556.419.839	24.554.476.951	0,31
Total Kredit	59.760.859.044.942	7.807.093.229.427	100,00

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Kota Surakarta, diolah.

Bila dikaitkan dengan PDRB, meskipun kredit yang disalurkan untuk sektor industri pengolahan memiliki porsi terbesar, namun nilai rasio terhadap PDRB tergolong kecil yaitu 0,18 selama 2018-2020. Hal ini berarti kredit sebesar Rp18 mampu memberikan kontribusi PDRB sebesar Rp100. Hal yang berbeda terjadi pada sektor konstruksi yang memiliki rasio pada tahun 2020 sebesar 4,64 yang berarti kredit sebesar Rp4,64 mampu memberikan kontribusi PDRB sebesar Rp1. Dengan demikian semakin kecil nilai rasio, semakin efektif kredit dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB.

Pada tahun 2018-2019 tambahan kredit pada sektor industri pengolahan (yaitu kredit +) mampu memberikan tambahan PDRB (yaitu PDRB +) namun di periode 2019-2020, tambahan kredit pada sektor industri pengolahan tidak mampu memberikan tambahan nilai pada PDRB (kredit + namun PDRB -). Kondisi sektor industri pengolahan ini sama dengan sektor transportasi dan pergudangan yaitu tambahan kredit tidak mampu menambah output PDRB. Untuk sektor perdagangan selama 2019-2020 terdapat pengurangan kredit (kredit -) namun nilai PDRB juga menunjukkan pengurangan.

Pada aspek elastisitas yaitu persentase perubahan PDRB sebagai akibat persentase perubahan kredit, di periode 2018-2019 nilai elastisitas sektor industri pengolahan adalah

1,253 yang berarti tambahan kredit 1 persen mampu menambah nilai PDRB sebesar 1,253%. Pada tahun 2019-2020 nilai elastisitas sektor industri pengolahan menunjukkan angka -7,940 yang artinya tambahan kredit sebesar 1% pada sektor ini justru membuat nilai output turun jauh lebih besar yaitu -7,940%. Dengan demikian dampak Pandemi Covid terhadap sektor industri pengolahan di Kota Surakarta tergolong cukup besar. Dampak yang lebih besar adalah sektor transportasi dan pergudangan yang menunjukkan angka elastisitas -33,614%. Meski demikian secara keseluruhan nilai elastisitas selama 2018-2019 maupun 2019-2020 menunjukkan angka positif yaitu masing-masing 1,182 dan 0,378 sehingga penyaluran kredit di Kota Surakarta masih memberikan dampak terhadap PDRB. Angka 0,378 di tahun 2020 berarti pengurangan kredit sebesar 1% berpengaruh terhadap pengurangan nilai PDRB 0,378% karena di tahun 2020 terjadi pengurangan kredit perbankan dan pengurangan nilai PDRB ADHB.

Tabel 4.20
Rasio Kredit terhadap PDRB dan Elastisitas

Kategori	Rasio PDRB Terhadap Kredit			2018-2019		2019-2020		Elastisitas	
	2018	2019	2020	Kredit	PDRB	Kredit	PDRB	2018-2019	2019-2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,16	0,15	0,16	+	+	-	+	0,363	-0,637
B. Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,00	0,01	+	-	-	-	-0,729	0,055
C. Industri Pengolahan	0,18	0,18	0,18	+	+	+	-	1,253	-7,940
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,34	2,87	4,21	-	+	-	+	-0,111	-0,035
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	+	-	+	-	-
F. Konstruksi	5,27	4,38	4,64	+	+	-	-	0,265	0,150
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,77	0,80	0,81	+	+	-	-	2,219	0,831
H. Transportasi dan Pergudangan	0,61	0,59	0,23	+	+	+	-	0,760	-33,614
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,90	0,90	0,80	+	+	-	-	1,034	3,046
J. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	+	-	+	-	-
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,43	4,70	6,07	-	+	-	+	-0,260	-0,140
Real Estate+Jasa Perusahaan	1,83	1,81	1,77	+	+	+	+	0,811	0,241
L. Real Estate	-	-	-	-	+	-	+	-	-
M,N. Jasa Perusahaan	-	-	-	-	+	-	-	-	-

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	300,06	264,03	262,57	+	+	-	-	0,275	2,139
P. Jasa Pendidikan	3,98	4,99	5,78	-	+	-	+	-0,688	-0,140
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,61	0,76	+	+	-	+	0,269	-2,321
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,04	0,04	0,03	+	+	-	-	1,525	13,838
Produk Domestik Regional Bruto	0,78	0,79	0,80	+	+	-	-	1,182	0,378

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan BPS Kota Surakarta, diolah.

4.2. ANALISIS PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH DI JAWA TENGAH

4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Pada tahun 2020 di masa Pandemi Covid, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menjadi negatif yaitu -1,74%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi ini mengalami kontraksi atau penurunan sebesar -7,52%. Namun kondisi ini juga terjadi di kota-kota lain di Jawa Tengah bahkan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta hanya di bawah Kota Semarang yang mencapai -1,61%. Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,65% dan nasional -2,07%. Dari aspek kontraksi atau penurunannya, kondisi Kota Surakarta masih tergolong baik. Kota Semarang yang tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan tertinggi yaitu 6,86% di tahun 2020 perekonomian tumbuh sebesar -1,61% atau terjadi kontraksi sebesar -8,47%. Pandemi Covid telah menyebabkan lumpuhnya Sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang negatif di semua daerah.

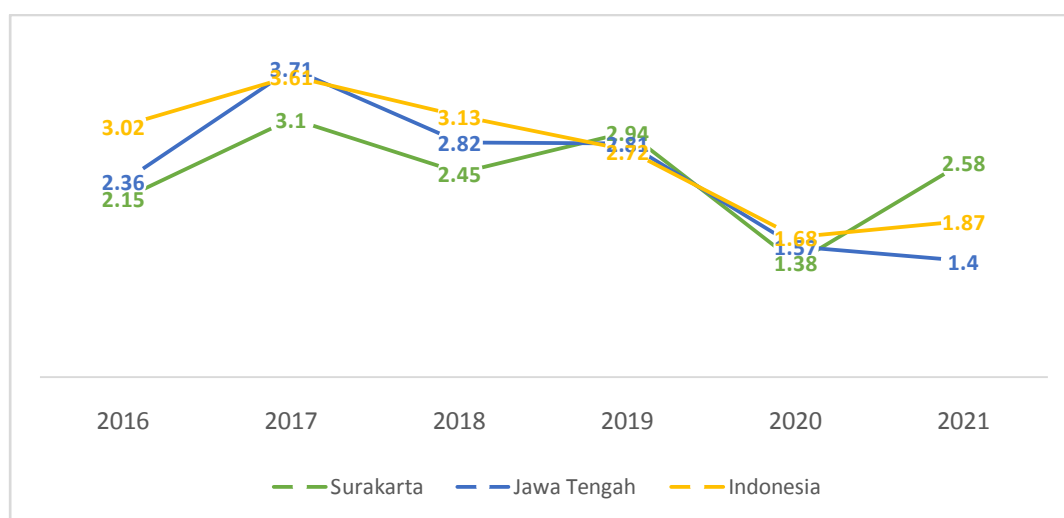
Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 4,01%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 3,69% maupun provinsi yang hanya sebesar 2,49%. Dibandingkan dengan rata-rata kota di Jawa Tengah, angka pertumbuhan Kota Surakarta tahun 2021 masuk dalam peringkat 6 se Jawa Tengah.

Tabel 4.21
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten di Jawa Tengah
Tahun 2019-2020 serta 2020-2021

Kabupaten/Kota	2019-2020	2020-2021	Kabupaten/Kota	2019-2020	2020-2021
Kabupaten Cilacap	-12,55	12,43	Kabupaten Kudus	-6,2	1,13
Kabupaten Banyumas	-7,97	5,65	Kabupaten Jepara	-7,94	6,55
Kabupaten Purbalingga	-6,82	4,37	Kabupaten Demak	-5,59	2,85
Kabupaten Banjarnegara	-6,92	4,58	Kabupaten Semarang	-8,06	6,3
Kabupaten Kebumen	-6,97	5,16	Kabupaten Temanggung	-7,18	5,47
Kabupaten Purworejo	-7,05	4,99	Kabupaten Kendal	-7,22	5,4
Kabupaten Wonosobo	-7,21	5,32	Kabupaten Batang	-6,68	6,17
Kabupaten Magelang	-6,97	5,15	Kabupaten Pekalongan	-7,24	5,43
Kabupaten Boyolali	-7,16	5,83	Kabupaten Pemalang	-6,41	4,8
Kabupaten Klaten	-6,65	4,99	Kabupaten Tegal	-7,04	5,2
Kabupaten Sukoharjo	-7,62	5,52	Kabupaten Brebes	-6,23	2,8
Kabupaten Wonogiri	-6,55	4,76	Kota Magelang	-7,86	5,65
Kabupaten Karanganyar	-7,63	5,44	Kota Surakarta	-7,54	5,77
Kabupaten Sragen	-7,71	5,56	Kota Salatiga	-7,58	5,01
Kabupaten Grobogan	-6,94	5,35	Kota Semarang	-8,66	7,01
Kabupaten Blora	-8,61	8,24	Kota Pekalongan	-7,37	5,46
Kabupaten Rembang	-6,69	5,34	Kota Tegal	-8,06	5,41
Kabupaten Pati	-6,97	4,54			

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Dari sisi inflasi, selama 2016-2021 inflasi Surakarta juga terlihat berfluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan mencapai titik terendah di tahun 2020 yaitu sebesar 1,38%. Angka inflasi tahun 2020 ini lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi di provinsi Jawa Tengah yang mencapai 1,57% maupun inflasi nasional yang mencapai 1,68%. Inflasi yang terjadi di tahun 2020 tersebut disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat sehingga output tidak terserap. Sedangkan pada tahun 2021, inflasi di Surakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah maupun inflasi nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Gambar 4.11

Perbandingan Inflasi Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2010-2020

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Beberapa studi yang pernah dilakukan menunjukkan adanya hubungan kausalitas diantara keduanya, artinya inflasi dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada laju inflasi. Hal ini perlu dicermati factor penyebabnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun diikuti oleh laju inflasi yang tinggi mengindikasikan terjadinya *overheating economy*. Kondisi ideal yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan inflasi yang rendah. Di masa Pandemi Covid yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang rendah bahkan negatif dan diikuti oleh inflasi yang juga rendah.

4.2.2. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Surakarta selama 2010-2019 menunjukkan trend yang menurun, hingga pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan pada tingkat kemiskinan di Surakarta. Lumpuhnya sebagian aktivitas ekonomi masyarakat khususnya di tahun 2020 mendorong semakin bertambahnya penduduk di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini juga dialami oleh semua daerah di Jawa Tengah, seperti Kota Magelang yang juga bertambah 2000 orang dan Kota Semarang yang bahkan bertambah sebesar 7.600 orang penduduk miskin. Di tingkat provinsi jumlah penduduk miskin selama 2019-2020 bertambah sebesar 237.670 orang atau naik 6,35%. Rata-rata jumlah penduduk penduduk miskin di seluruh daerah di Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 6.790 orang atau 6,35% sementara secara nasional jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 1.638.020 atau naik 6,61%.

Tabel 4.22
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Surakarta vs Provinsi vs Nasional
Tahun 2019-2021

TINGKAT KEMISKINAN

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	13,96	12,92	12,00	11,74	10,95	10,89	10,88	10,65	9,08	8,70	9,03	9,40
2	Provinsi Jawa Tengah	16,11	16,21	14,98	14,44	13,58	13,58	13,27	13,01	11,32	10,80	11,41	11,79
3	Indonesia	13,90	12,36	11,66	14,47	10,96	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71
4	Rata-rata Jawa Tengah	13,76	13,92	12,84	12,30	11,56	11,52	11,25	10,99	9,67	9,27	9,83	10,22
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	8,77	9,03	8,32	7,81	7,41	7,31	7,05	6,83	6,24	6,03	6,36	6,64

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN=P1

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	2,19	1,89	1,33	1,63	1,48	1,74	1,34	1,87	1,47	1,6	1,51	1,83
2	Provinsi Jawa Tengah	2,62	2,58	2,39	2,37	2,09	2,44	2,37	2,21	1,85	1,53	1,72	1,91
3	Indonesia	2,21	2,08	1,90	1,89	1,75	1,84	1,74	1,79	1,63	1,55	1,75	1,67
4	Rata-rata Jawa Tengah	2,26	2,24	1,89	1,84	1,70	1,98	1,88	1,77	1,57	1,23	1,39	1,62
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	1,33	1,39	1,04	1,04	0,98	1,06	0,92	1,06	0,96	0,96	1,01	1,05

INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN=P2

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	0,53	0,46	0,28	0,34	0,3	0,4	0,35	0,44	0,35	0,48	0,38	0,54
2	Provinsi Jawa Tengah	0,68	0,66	0,57	0,59	0,51	0,65	0,63	0,57	0,45	0,3	0,34	0,45
3	Indonesia	0,58	0,55	0,48	0,48	0,44	0,51	0,44	0,46	0,41	0,37	0,47	0,42
4	Rata-rata Jawa Tengah	0,55	0,53	0,41	0,40	0,38	0,49	0,46	0,42	0,36	0,23	0,26	0,37
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	0,30	0,34	0,20	0,21	0,22	0,23	0,19	0,25	0,21	0,21	0,22	0,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Peningkatan jumlah penduduk miskin berdampak pada kenaikan tingkat pengangguran yaitu rasio jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun. Tingkat kemiskinan di Kota Surakarta tahun 2019 adalah 8,70% dan tahun 2020 naik menjadi 9,03%. Dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah, angka ini tergolong cukup tinggi, meski masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, bahkan di tingkat nasional. Meskipun demikian kenaikan tingkat kemiskinan di Kota Surakarta selama 2019-2020 yang besarnya 0,33% tergolong kecil bila dibandingkan dengan rata-rata daerah di Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, maupun nasional.

Dalam kemiskinan, terdapat dua ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2020 Kota Surakarta memiliki indeks P1 sebesar 1,5 dan pada tahun 2021 naik menjadi 1,83. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin adalah 1,83 kali lebih rendah dari garis kemiskinannya. Untuk indeks P2, pada tahun 2020 nilai indeks P2 Kota Surakarta adalah 0,38 dan tahun 2021 adalah 0,54.

Bila dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah, kondisi Surakarta untuk P1 dan P2 masih yang tertinggi selama 2019-2021 bahkan juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius mengingat P1 menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan. Dengan nilai P1 sebesar itu, berarti pengeluaran penduduk miskin di Surakarta

adalah yang terjauh dari garis emiskinan dibandingkan kota lain. Untuk P2, pengeluaran diantara penduduk miskin di Surakarta adalah yang paling timpang dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah.

Besar kecilnya tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk, sementara penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 2019 garis kemiskinan Kota Surakarta adalah Rp473.516 dan tahun 2020 naik menjadi Rp487.445 atau naik sebesar 2,94%. Kenaikan yang terjadi di tahun 2020 tersebut secara relative adalah yang terkecil bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, provinsi, maupun nasional

4.2.3. Tingkat Pengangguran

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengangguran akan mendorong timbulnya permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang ditempuh harus diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan tingkat pengangguran, namun bila kenaikan jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah pengangguran, maka tingkat pengangguran akan turun.

Tingkat pengangguran di Surakarta pada tahun 2020 meningkat tajam menjadi 7,92% akibat dampak Pandemi Covid. Kenaikan tingkat pengangguran di tahun 2020 tersebut menjadikan Kota Surakarta sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, provinsi, maupun nasional. Di antara kota lain sendiri, tingkat pengangguran Kota Surakarta tahun 2020 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan Kota Semarang (9,57%), Kota Magelang (8,59%) serta Tegal (8,40%). Dari tahun 2019-2020 tingkat pengangguran Kota Surakarta naik sebesar 3,74%, di bawah Kota Semarang dan Kota Magelang. Pada Tahun 2021, tingkat pengangguran Kota Surakarta 7,85% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran Jawa Tengah dan Nasional. Namun, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2020.

Tabel 4.23
Perbandingan Tingkat Pengangguran Surakarta vs Jawa Tengah vs Nasional
Tahun 2019-2021

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)													
No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	8,73	7,70	6,29	7,22	6,16	4,53	7,55	4,47	4,39	4,18	7,92	7,85
2	Provinsi Jawa Tengah	6,21	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99	4,63	4,57	4,51	4,49	6,48	5,95
3	Indonesia	7,14	7,48	6,13	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07	6,49
4	Rata-rata Jawa Tengah	5,96	6,81	5,48	5,85	5,42	4,63	n.a.	4,26	4,16	4,22	6,18	5,52
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	6,48	7,12	5,75	6,01	5,63	4,97	n.a.	4,54	4,48	4,44	8,12	8,04

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)													
No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	66,81	67,22	70,43	72,30	68,48	70,12	n.a.	66,10	65,62	69,27	68,84	66,89
2	Provinsi Jawa Tengah	70,60	70,15	71,26	70,43	69,68	67,86	n.a.	69,11	69,20	68,85	69,43	69,58
3	Indonesia	67,72	66,78	67,76	66,77	66,60	65,76	66,34	66,67	67,26	67,53	67,77	67,80
4	Rata-rata Jawa Tengah	70,70	70,30	71,35	70,52	69,69	67,94	n.a.	69,05	69,06	68,96	69,15	69,91
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	68,70	67,90	68,21	68,72	67,47	66,04	n.a.	67,84	68,06	68,27	67,87	69,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diolah.

4.2.4. Indikator Sosial dan Kesejahteraan

Salah satu indikator sosial dan kesejahteraan adalah indikator yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), serta pengeluaran perkapita. Berdasarkan indikator tersebut, Surakarta memiliki nilai yang lebih tinggi untuk keempat komponen IPM bila dibandingkan dengan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, maupun nasional, namun nilai tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan Kota Semarang dan Kota Salatiga. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, IPM Kota Surakarta khususnya pada tahun 2021 berada di atas IPM provinsi maupun nasional. Selain itu, IPM Kota Surakarta juga berada di atas IPM rata-rata kota/kabupaten di Jawa Tengah. Dari tahun 2010 hingga 2021, IPM Kota Surakarta cenderung mengalami trend yang meningkat. Hanya pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan.

Tabel 4.24

Komponen IPM Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2019-2021

Umur Harapan Hidup (UHH)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	72,16	72,25	72,35	76,97	76,99	77,00	77,03	77,06	77,11	77,12	77,22	77,32
2	Provinsi Jawa Tengah	72,73	72,91	73,09	73,28	73,88	73,96	74,02	74,08	74,18	74,23	74,37	74,47
3	Indonesia	69,81	70,01	70,20	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06	71,2	71,34	71,47	71,57
4	Rata-rata Jawa Tengah	74,17	74,24	74,30	74,37	74,41	74,50	74,56	74,63	74,69	74,78	74,91	75,01
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	75,77	75,81	75,85	75,89	75,91	75,97	76,01	76,06	76,12	76,16	76,28	76,38

Harapan Lama Sekolah (HLS)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	13,17	13,34	13,5	13,64	13,92	14,14	14,5	14,51	14,52	14,55	14,87	14,88
2	Provinsi Jawa Tengah	11,09	11,18	11,39	11,89	12,17	12,38	12,45	12,57	12,63	12,68	12,70	12,77
3	Indonesia	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08
4	Rata-rata Jawa Tengah	11,21	11,41	11,63	11,90	12,19	12,46	12,59	12,72	12,74	12,85	12,92	12,97
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	12,53	12,64	12,74	12,96	13,29	13,60	13,90	14,03	14,09	14,18	14,31	14,32

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	9,99	10,05	10,11	10,25	10,33	10,36	10,37	10,38	10,53	10,54	10,69	10,9
2	Provinsi Jawa Tengah	6,71	6,74	6,77	6,80	6,93	7,03	7,15	7,27	7,35	7,53	7,69	7,75
3	Indonesia	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54
4	Rata-rata Jawa Tengah	6,74	6,85	6,96	7,11	7,24	7,37	7,45	7,58	7,57	7,76	7,89	7,98
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	8,93	9,06	9,16	9,29	9,42	9,53	9,59	9,70	9,77	9,80	9,92	10,15

Pengeluaran per kapita (Rp ribuan/orang/tahun)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	12.123	12.464	12.680	12.820	12.907	12.604	13.900	13.986	14.528	15.049	14.761	14.911
2	Provinsi Jawa Tengah	8.992	9.296	9.497	9.618	9.640	9.930	10.153	10.377	10.777	11.102	10.930	11.034
3	Indonesia	9.437	9.647	9.815	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156
4	Rata-rata Jawa Tengah	9.012	9.296	9.497	9.618	9.655	9.938	10.181	10.414	10.837	11.217	11.018	11.139
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	11.345	11.652	11.885	12.042	12.131	12.598	12.880	13.142	13.671	14.165	13.897	14.045

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta	77,86	78,18	78,60	78,89	79,34	80,14	80,76	80,85	81,46	81,86	82,21	82,62
2	Provinsi Jawa Tengah	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16
3	Indonesia	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29
4	Rata-rata Jawa Tengah	66,49	67,24	67,90	68,58	69,12	69,94	70,47	71,06	71,67	72,26	72,39	72,72
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	74,07	74,63	75,11	75,67	76,27	77,15	77,78	78,27	78,85	79,36	79,50	79,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Indikator sosial dan kesejahteraan yang juga memerlukan perhatian adalah indeks pembangunan gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Meskipun smooth, nilai IPG Kota Surakarta selama 2019-2021 menunjukkan peningkatan dari 96,72 menjadi 96,89 atau naik sebesar 0,17 poin. Nilai IPG Surakarta selama 2019-2021 selalu di atas provinsi Jawa Tengah dan nasional serta di atas IPG rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah. Dibandingkan dengan kota-kota di Jawa Tengah pun nilai IPG Kota Surakarta masih menempati urutan tertinggi.

Tabel 4.25

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

IPG (Indeks Pembangunan Gender)												
No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Surakarta	95,28	95,32	95,70	96,16	96,48	96,38	96,38	96,74	96,82	96,72	96,84
2	Provinsi Jawa Tengah	90,32	90,91	91,12	91,50	91,89	92,21	92,22	91,94	91,95	91,89	92,18
3	Indonesia	89,42	89,52	90,07	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06
4	Rata-rata Jawa Tengah	89,09	89,85	90,46	90,90	91,36	91,64	n.a.	91,90	91,98	91,88	92,04
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	93,08	93,68	94,16	94,57	94,95	95,22	n.a.	95,22	95,31	95,17	95,18

IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)												
No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Surakarta	75,70	78,06	79,32	78,93	74,93	74,98	n.a.	77,25	77,10	77,88	79,42
2	Provinsi Jawa Tengah	67,96	68,99	69,06	71,22	74,46	74,80	n.a.	75,10	74,05	72,18	71,73
3	Indonesia	68,13	69,14	70,07	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74	72,10	75,24	75,57
4	Rata-rata Jawa Tengah	63,16	64,28	64,22	65,30	66,88	67,69	n.a.	67,89	68,76	69,31	69,23
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	68,69	71,14	71,18	71,82	74,85	75,20	n.a.	75,20	76,49	71,34	71,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diolah.

4.3. RANGKUMAN INDIKATOR UTAMA MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, maka beberapa indikator makroekonomi utama yang menunjukkan kinerja perekonomian serta berpengaruh terhadap kondisi yang terjadi saat ini dapat dirangkum pada tabel di bawah ini. Selain itu, agar Kota Surakarta dapat mengetahui posisi relative kinerja makroekonominya, disajikan pula tabel peringkat beberapa indikator makroekonomi Kota Surakarta.

Tabel 4.26

Ringkasan Indikator Utama Makroekonomi Kota Surakarta 2019-2020

INDIKATOR	2019	2020	Naik/(Turun)
PDRB ADHK (Juta Rp)	35.442.856,07	34.827.188,29	(615.667,78)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,78	(1,74)	(7,52)
Jumlah Pengangguran (orang)	12.003,00	22.877,00	10.874,00
Tingkat Pengangguran (%)	4,18	7,92	3,74
Jumlah Penduduk Miskin (ribuan orang)	45,18	47,03	1,85
Tingkat Kemiskinan (%)	8,70	9,03	0,33
PDRB Perkapita Riil (rupiah/orang/tahun)	68.213.515,87	66.672.259,75	(1.541.256,12)
PAD (Juta Rp)	546.020,01	493.789,10	(52.230,91)
Penerimaan Pajak (Juta Rp)	360.053,93	279.209,95	(80.843,98)
Tax Ratio-basis Pajak Daerah (%)	0,75	0,59	(0,16)
Tax Ratio-basis Pajak Daerah+Bagi Hasil Pajak (%)	1,10	0,86	(0,23)
Inflasi (%)	2,94	1,38	(1,56)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Tabel 4.27**Peringkat Indikator Makroekonomi Kota Surakarta di Jawa Tengah Tahun 2019-2020**

Indikator	Peringkat	
	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1	1
Usia Harapan Hidup (UHH)	5	5
Harapan Lama Sekolah	10	8
Rata-rata Lama Sekolah	13	13
Pengeluaran Perkapita (orang/bulan)	13	12
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	22	20
Pertumbuhan Ekonomi	11	23
Tingkat Kemiskinan	12	11
Tingkat Pengangguran	19	29
PDRB Perkapita ADHB	23	24
PDRB Perkapita ADHK	3	3

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diolah.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

- 1) Kinerja perekonomian Kota Surakarta menunjukkan penurunan selama 2020-2021 menunjukkan peningkatan sebagai wujud dari pemulihan berbagai sektor perekonomian pasca Pandemi Covid. Peningkatan berbagai sektor perekonomian tersebut belum berdampak secara signifikan pada kondisi kesejahteraan masyarakat seperti tingkat kemiskinan, peningkatan tingkat pengangguran, penurunan pengeluaran perkapita, serta penurunan pendapatan perkapita masyarakat.
- 2) Sektor dengan peningkatan proporsi kontribusi terhadap PDRB Kota Surakarta 2021 antara lain sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, serta jasa keuangan dan asuransi.
- 3) Dikaitkan dengan kredit perbankan secara sektoral, sektor industri manufaktur merupakan sektor yang memiliki alokasi kredit perbankan terbesar namun juga memiliki non performing loan (NPL) yang paling besar. Sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB justru tidak mendapatkan alokasi kredit perbankan yang besar.
- 4) Alokasi kredit perbankan memiliki dampak besar dalam menggerakkan perekonomian, hal ini terlihat dari nilai elastisitas antara kredit perbankan dengan sektor ekonomi. Secara keseluruhan kredit perbankan memiliki nilai elastisitas yang positif sehingga kenaikan kredit perbankan berpengaruh secara searah dengan penambahan nilai output PDRB.
- 5) Nilai ICOR Kota Surakarta untuk lag 1 periode menghasilkan angka yang tinggi, namun untuk lag 2 dan lag 3 periode menghasilkan angka yang jauh lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi dan pembentukan modal tetap di Kota Surakarta didominasi oleh investasi yang bersifat jangka Panjang sehingga baru menghasilkan (berdampak terhadap perekonomian) setelah 2-3 tahun ke depan.
- 6) Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, kinerja perekonomian Kota Surakarta secara relative mengalami penurunan. Hal ini terlihat pemeringkatan beberapa indikator yang menunjukkan penurunan dibandingkan dengan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

5.2. REKOMENDASI

5.2.1. Jangka Pendek/Menengah

Tujuan: Pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan

Sasaran: Minimalisir dampak Covid serta mempercepat Pemulihan Ekonomi

- 1) Mapping data profil pelaku usaha terdampak Covid lintas sectoral/OPD dan integral (terpadu), meliputi: bidang usaha, omzet per hari (bulan), lamanya usaha dijalankan, profil keluarga, dan data relevan lain.
- 2) Evaluasi program dan kegiatan serta realokasi anggaran OPD.
- 3) Menyelenggarakan “*bantuan pemberdayaan masyarakat produktif*” dengan kriteria tertentu (usaha masih jalan, batasan omzet, jumlah tanggungan keluarga, KTP domisili, dsb), dan dilaksanakan dengan skema tertentu.
- 4) Memberikan “bantuan miskin produktif” khusus untuk kelompok miskin dan rentan miskin dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan sederhana memulai usaha mikro rumah tangga.

5.2.2. Jangka Menengah/Panjang

Tujuan: Penguatan ekonomi kreatif masyarakat

Sasaran: Mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

- 1) Melaksanakan kerja sama dengan perusahaan dalam pelatihan yang **bersertifikat**, melalui skema CSR yang melibatkan perguruan tinggi maupun LSM. Perusahaan dapat berpartisipasi aktif dalam bentuk penyediaan dana, peralatan, instruktur, tempat magang, atau dalam bentuk lain.
- 2) Menyusun Perda atau Perwali yang mampu secara nyata memperjelas dan mempertegas kewajiban BUMD, perusahaan, dan lembaga ekonomi terkait dalam pemberdayaan warga miskin serta usaha mikro dan perorangan untuk mengoptimalkan konsep redistribusi pendapatan dan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- 3) Pengembangan kegiatan Balai Latihan Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembekalan keterampilan teknis sebagai langkah awal memulai dan mengembangkan usaha sesuai keterampilan masing-masing.
- 4) Pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Surakarta dalam beberapa bentuk: pengurangan/pembebasan pajak daerah atau retribusi daerah, grace period, kepengurusan dokumen perizinan, kepemilikan lahan, dan sebagainya sesuai dengan kriteria tertentu. Kebijakan ini harus diinformasikan secara luas ke berbagai daerah bahkan negara lain, bekerjasama dengan asosiasi terkait.

- 5) Menyusun agenda event setidak-tidaknya setahun sekali di Kota Surakarta (bekerjasama dengan pihak lain) dalam rangka menguatkan citra Surakarta sebagai kota wisata budaya, kota wisata kuliner, kota pendidikan, sebagai Langkah awal memulihkan kondisi perekonomian Kota Surakarta.
- 6) Mengembangkan ekonomi kreatif sesuai potensi masing-masing wilayah/kecamatan dengan prioritas utama yang memiliki *multiplier effect* besar dalam penyerapan tenaga kerja secara sektoral maupun spasial.
- 7) Reorientasi pembangunan sarana dan prasarana yang memiliki outcome langsung dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, baik UMKM maupun IKM. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi dan investigasi terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2022. <https://surakartakota.bps.go.id>. Diakses 19 April 2021.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. <https://jateng.bps.go.id>. Diakses 19 April 2021.